



DRPDR PROVINSI BENGKULU

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mengimbau kepada seluruh masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, ketertiban, dan kemajuan daerah.

- 1. Bijak dalam Bermedia Sosial**
Gunakan media sosial secara cerdas, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memecah belah masyarakat.
- 2. Mendukung Program Pembangunan Daerah**
Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung program pemerintah demi kemajuan Provinsi Bengkulu.
- 3. Mengawasi dan Melaporkan**
Masyarakat diharapkan turut berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan serta melaporkan jika terdapat indikasi penyimpangan.
- 4. Tingkatkan Semangat Gotong Royong**
Mari bersama menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat solidaritas, dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat.

DRPD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus bekerja secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kebersamaan, kita wujudkan Bengkulu yang lebih baik dan membanggakan. **"Bersatu, Bergerak, Maju untuk Bengkulu"**



Drs. Sumardi, MM
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu

Teuku Zulkarnain, SE Waka I
Sonti Bakara, SH Waka II
Agus Riyadi, S.Si, M.Si Waka III



H. Mustarani Abidin, SH, M.Si
Sekretaris Dewan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH



Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P
BUPATI BENGKULU TENGAH



Tarmizi, S.Sos
WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH

WASPADA!

PENYAKIT CAMPAK

CAMPAK SANGAT MENULAR, TAPI BISA DICEGAH DENGAN IMUNISASI!

APA ITU CAMPAK?
Campak adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular melalui udara (batuk/bersin) dan dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak.

GEJALA CAMPAK



KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI



BAGAIMANA CAMPAK MENULAR?

- Melalui percikan ludah saat batuk/bersin
- Kontak langsung dengan penderita
- Udara di ruangan tertutup yang terkontaminasi virus

CEGAH CAMPAK DENGAN IMUNISASI

Pastikan anak mendapatkan imunisasi **CAMPAK - RUBELLA (MR)**

USIA 9 BULAN
(Imunisasi MR Dosis 1)



USIA 18 BULAN
(Imunisasi MR Dosis 2)



IMUNISASI AMAN, GRATIS, DAN BERKUALITAS

Ayo lengkapi imunisasi anak demi masa depan yang sehat!

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

- Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika anak demam dan muncul ruam merah
- Jangan membawa anak ke sekolah/komunitas sampai sembuh
- Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat: cuci tangan, etika batuk, dan jaga kebersihan lingkungan

LINDUNGI DIRI, LINDUNGI ANAK, LINDUNGI KELUARGA!
BERSAMA KITA CEGAHPENYAKIT CAMPAK DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PANITIA "FORMALITAS" SERTIFIKAT DALAM HUTAN

RIO/RB
JELASKAN : Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Selatan Hariandana Hidayat SH saat menjelaskan perkembangan penyidikan perkara sertifikat dalam hutan.



Jaksa Beberkan Hasil Penyidikan

KOTA MANNA - Penanganan perkara sertifikat dalam hutan di kawasan Bukit Rabang Kecamatan Ulu Manna terus bergulir. Jaksa Bengkulu Selatan kembali menyampaikan hasil penyidikan terhadap enam orang tersangka saat ini. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan, Chandra Kirana SH MH melalui Kasi Pidsus Hariandana Hidayat SH, mengatakan dalam penanganan perkara 19 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Rabang, jaksa Bengkulu Selatan telah mengungkap beberapa ahli. Dari Kehutanan dan Kerusakan Lingkungan.

► Baca PANITIA...Hal 11

TERSANGKA KASUS SERTIFIKAT DALAM HUTAN

- Kasi Penataan Pertanahan BPN Manna, RH.
- Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN, JS.
- Petugas Ukur BPN Manna, PE.
- Mantan Kades Keban Jati, SB
- ASN aktif Bengkulu Selatan, NMA.
- Mantan Kepala BPN Manna periode 2018, SR.



Modus Minyakita Gadungan!

Polisi: Kemasan Dipalsukan, Isi Tidak Sesuai

BENGKULU – Praktik melawan hukum dalam distribusi minyak goreng terungkap. Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu membeberkan modus dalam kasus Minyakita gadungan.

Pengungkapan ini menyoroti dugaan kuat tindak pidana pemalsuan label, pengemasan ulang tanpa izin, hingga penipuan terhadap konsumen.

Aktivitas ilegal tersebut diketahui beroperasi di tengah permukiman warga. Direktur Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Aris Tri Yunarko melalui Kasubdit Indagsi AKBP Herman Sopian mengungkapkan, minyak goreng yang dikemas ulang tersebut tidak sesuai dengan izin edar. Selain itu, isi dalam kemasan juga tidak sesuai dengan volume yang tertera.

► Baca MODUS...Hal 11



TUNJUKAN : Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu AKBP Herman Sopian, S.IK menunjukkan kemasan dan barang bukti Minyakita gadungan.



BARANG BUKTI: Bio solar di dalam tedmon pada kendaraan di lapangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu.



BERI KETERANGAN: Kasubdit Tipidter Kompol Mirza Gunawan, S.IK didampingi jajaran.

Polda Bengkulu Ringkus Satu Tersangka BARCODE BERULANG TIMBUN 5 TON SOLAR

BENGKULU – Polda Bengkulu menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5.000 liter atau 5 ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar yang hendak dikirim ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam pengungkapan ini, satu orang tersangka diamankan dengan modus pembelian BBM menggunakan barcode secara berulang.

► Baca BARCODE...Hal 11

Ladang Suap Rekrutmen THL Perumda Tirta Hidayah

Eks Dirut Dituntut 8 Tahun Penjara

BENGKULU - Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah SH.,MH pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

► Baca LADANG...Hal 11



DENGARKAN: Terdakwa kasus dugaan korupsi penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu sedang mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu di PN Bengkulu Selasa 5 Mei 2026.

LET'S GO TOYOTA BEYOND

TUKAR MOBIL LAMA ANDA DENGAN VELOZ HV TERBARU

IT'S TIME FOR EVERYONE TO HEV

HYBRID EV UNTUK SEMUA



NEW VELOZ HYBRID EV

KONSUMSI BBM: 1 LTR = 30 KM*

UNTUK SEMUA TIPE
LEBIH PRAKTIS
LEBIH BERNILAI
LEBIH TENANG

*Syarat & ketentuan berlaku

Panitia "Formalitas" Sertifikat dalam Hutan

Sambungan dari halaman 1

Hasilnya penyidik jaksa mengambil beberapa sampel di TKP berupa tanah tumbuh dan tanah.

"Nanti akan diuji melalui laboratorium," kata Hariandana didampingi Kasi Intelijen M.Rifani Agustam SH MH.

Selain itu dalam kasus ini jaksa juga menggandeng Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) untuk menilai paket nilai pasar terhadap tanah-tanah yang dialihfungsikan secara unprosedural.

Sedangkan untuk kerugian negara lanjut Hariandana tim penyidik Kejaksaan sedang melakukan koordinasi pihak terkait, seperti pihak internal.

"Nantinya ada kolaborasi tentang kerugian materil, ekologi, lingkungan, nanti terakumulasi dalam penghitungan kerugian negara. Untuk saat ini belum simpulkan dan masih menunggu hasil," jelasnya.

Total enam tersangka saat ini paling banyak dari BPN Manna empat orang termasuk mantan Kepala BPN Manna tahun 2018 SR.

Sebelumnya Kejari Bengkulu Selatan juga menetapkan Kasi Penataan

Pertanahan BPN Manna, RH sebagai tersangka. Lalu Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN, JS, Petugas Ukur BPN Manna, PE, Mantan Kades Keban Jati, SB, ASN aktif Bengkulu Selatan, NMA.

Hariandana menjelaskan dalam kasus ini terbagi dalam tiga kluster. Dimana kluster pertama pihak BPN Manna. Yang kedua dari pejabat pemerintah desa. Dan yang ketiga oknum ASN Pemkab Bengkulu Selatan.

Untuk kluster BPN sendiri sebut Hariandana faktanya ditemukan bahwa pihak BPN tidak melakukan identifikasi verifikasi dan inventarisasi terhadap objek tanah yang akan didapatkan dalam program redistribusi tanah tahun 2018.

Program Redistribusi Tanah adalah upaya pemerintah untuk membagikan tanah yang dikuasai negara kepada rakyat (seperti petani kecil atau warga kurang mampu) guna mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Program ini merupakan bagian inti dari Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum hak atas tanah.

Masih kata Hariandana, sebelum dilaksanakan program redistribusi tanah. Ada pembentukan tim panitia pertimbangan. Terhadap tim BPN ini seharusnya melakukan pengkajian secara detail terhadap tanah atau objek dan subjek penerima dari program redistribusi. Tidak asal-asalan.

Faktanya hal demikian itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya melainkan formalitas dan tidak dilakukan pembahasan secara detail. Sehingga output yang keluar berita acara pertimbangan panitia yang salah satunya mengatakan objek tanah atau titik koordinat tidak termasuk dalam kawasan hutan.

"Sejauh ini Fakta yang kita dapat tim penyidik tidak ada kombinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)," ujarnya.

Terkahir Hariandana menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini tidak ada pendampingan dari pihak kejaksaan. "Dan kejaksaan tidak termasuk dalam anggota panitia pertimbangan landreform (sidang yang membahas redistribusi tanah untuk memastikan legalitas dan menghindari konflik hukum) tahun 2018," pungkasnya. (tek)

Ladang Suap Rekrutmen...

Sambungan dari halaman 1

Selain itu, perbuatan terdakwa secara bersama-sama melawan hukum dengan merekrut THL tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan aturan yang sah atau SOP.

Bahkan terdakwa juga menerima uang suap dalam proses perekrutan THL sebanyak 117 orang di Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu tanpa proses secara resmi hingga mengakibatkan kerugian negara.

Perbuatan melawan hukum ini mencederai marwah jabatan. Para terdakwa memanfaatkan kedudukan untuk melakukan gratifikasi dan suap.

Berdasarkan hal tersebut, unsur pada Pasal 12 huruf a dan juga dakwaan subsidair pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 terpenuhi.

Bahkan dengan tindakan bersama-sama dan berlanjut juga turut terpenuhi, yakni Pasal 20 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atas hal tersebut, mantan Direktur Utama Perumda Tirta Hidayah, Samsu Bahari, dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun serta denda Rp200 juta subsidir 80 hari, dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp11 miliar subsidir 5 tahun penjara.

Kemudian, Kasubag Umum Perumda Tirta Hidayah, Yanwar Pribadi, dituntut pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp200 juta subsidir 80 hari, serta di-

bebaskan membayar uang pengganti sebesar Rp865 juta subsidir 3,5 tahun penjara.

Terakhir, Kasubbag Pergantian Water Meter sekaligus broker, Eki Hermanto, dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti Rp1,180 miliar subsidir 3,5 tahun.

Tuntutan kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi Perumda Tirta Hidayah ini berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 20 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Demi keadilan dan ketuhanan yang maha esa maka menuntut para terdakwa masing-masing sebagaimana termuat dalam amar tuntutan berdasarkan hal memberatkan, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN serta melakukan kerugian negara dengan memanfaatkan jabatan sehingga timbul pidana di dalamnya," ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari, SH, MH.

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa dan advokat mengajukan pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan pada sidang selanjutnya.

"Kami akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya," kata Eti, advokat terdakwa di depan majelis hakim. (wjt)

Barcode Berulang Timbun 5 Ton Solar

Sambungan dari halaman 1

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim) Polda Bengkulu melalui Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) berhasil mengungkap praktik ilegal distribusi BBM subsidi yang diduga telah berlangsung cukup lama dan melibatkan jaringan terorganisir.

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan pengangkutan BBM dalam jumlah besar dari wilayah Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, menuju perbatasan Bengkulu-Sumatera Selatan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur distribusi.

Setelah memastikan target, petugas kemudian melakukan penindakan terhadap satu unit truk yang tengah mengangkut BBM jenis Bio Solar. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sekitar 5.000 liter BBM subsidi yang ditampung dalam lima tangki berkapasitas masing-masing 1.000 liter.

Dari hasil interogasi di lokasi, polisi mengamankan seorang pria berinisial RE, warga Lubuk Tan-

jung, Kota Lubuk Linggau, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Dirreskrim Polda Bengkulu Kombes Pol Aris Tri Yunarko melalui Kasubdit Tipidter Kompol Mirza Gunawan menjelaskan, tersangka memperoleh BBM subsidi dengan cara membeli secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan barcode yang tidak sesuai peruntukan.

"Modusnya, tersangka membeli BBM bersubsidi secara berulang menggunakan barcode yang tidak sesuai, kemudian dikumpulkan dan dijual kembali ke wilayah Lubuk Linggau," ujar Mirza, Selasa 5 April 2026.

Dalam praktiknya, tersangka tidak bekerja sendiri. Ia diduga menjadi bagian dari jaringan pengumpul BBM subsidi atau yang kerap disebut "pengunjal".

Para pelaku ini saling berkoordinasi untuk membeli BBM di berbagai SPBU, lalu mengumpulkannya dalam jumlah besar sebelum dijual kembali.

"Ini kita asumsikan sebagai komplotan. Mereka saling bekerja sama mengumpulkan BBM dengan menggunakan barcode secara berulang," tambahnya.

Dari keterangan tersangka, aktivi-

tas ilegal ini telah dijalankan selama kurang lebih enam bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, tersangka rutin mengirim BBM ke Lubuk Linggau untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, yakni berkisar antara Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter.

Keuntungan diperoleh dari selisih harga BBM subsidi dengan harga jual di luar daerah. Praktik ini dinilai merugikan negara sekaligus mengganggu distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit truk serta lima tangki berisi BBM jenis Bio Solar dengan total sekitar 5.000 liter.

Saat ini, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat, termasuk dugaan adanya penadah maupun pihak yang turut membantu penyediaan barcode.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. (wjt)

Modus Minyakita Gadungan!

Sambungan dari halaman 1

"Produk ini tidak sesuai izin edar, dan volumenya juga tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam kemasan," tegas Herman.

Lebih jauh, penyidik menemukan adanya upaya sistematis untuk mengelabui konsumen. Pelaku diduga dengan sengaja menutup barcode resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), lalu menggantinya dengan label lain menggunakan bahan tahan air.

"Label barcode BPOM dan logo halal MUI ditutup atau ditempel ulang dengan kertas tahan air yang mencantumkan PT Cikal Indonesia yang berdomisili di Bandung, padahal kegiatan pengemasan ulang dilakukan di Bengkulu," ungkapnya.

Padahal, pada kemasan asli Minyakita tercantum produsen resmi seperti PT Eru Satria Oil di Bandung dan PT Minyak Sawit Indonesia di Dumai. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan barcode dan nomor registrasi BPOM pada produk yang disita tidak sesuai.

"Ini jelas perbuatan melawan hukum. Kemasan dipalsukan, identitas produsen dimanipulasi, dan isinya juga tidak sesuai. Seharusnya 1 liter, tetapi hanya sekitar 900 mililiter," tegas Herman.

Polisi menduga praktik ini telah berlangsung cukup lama dan terorganisir. Selain memproduksi di Bengkulu, hasil pengemasan ulang tersebut juga didistribusikan ke luar daerah, termasuk ke wilayah Bandung, Jawa Barat, melalui jalur darat.

Kasus ini sendiri telah terendus aparat sejak sebulan terakhir sebelum akhirnya dilakukan penggerebekan dan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar.

Saat ini, penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan produksi dan distribusi minyak goreng oplosan tersebut.

Polda Bengkulu menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada pelaku karena perbuatannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen serta berpotensi membahayakan kesehatan. (wjt)



MATANGKAN: Pemprov Bengkulu matangkan rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Bengkulu periode 2024-2029.

Korpri Provinsi Bengkulu Siapkan PAW, Banyak Pengurus Tak Aktif

BENGKULU - Kursi pengurus mulai kosong. Korpri Bengkulu goyah.

Sejak Selasa, 5 Mei 2026, Pemprov Bengkulu mulai menyiapkan pergantian antar waktu (PAW) kepengurusan Korpri periode 2024-2029. Penyebabnya sederhana. Banyak pengurus tak lagi aktif.

Posisi ketua jadi sorotan. Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, menyebut ketua sebelumnya, Isnan Fajri, tak lagi bisa menjalankan peran secara penuh.

"Karena ketua sebelumnya sudah

tidak bisa aktif lagi, maka kepengurusan perlu dilakukan pergantian antar waktu," ujarnya.

Bukan hanya satu kursi. Beberapa pengurus lain juga ikut kosong. Ada yang pindah instansi, pensiun, bahkan meninggal dunia.

Kondisinya membuat roda organisasi tidak lagi berjalan normal.

"Di dalam struktur juga ada yang sudah pindah tugas, ada yang meninggal, dan ada yang tidak lagi menjabat," katanya.

Solusinya satu. PAW. Pemprov Bengkulu memastikan pergantian

ini hanya untuk mengisi kekosongan. Masa jabatan tetap mengacu periode 2024-2029.

Mekanismenya juga sudah dikonsultasikan ke pusat.

"Kita sudah konsultasi ke Korpri Pusat, dan mekanismenya bisa melalui musyawarah luar biasa atau rapat pimpinan," jelas Nandar.

Nama pengganti belum muncul. Saat ini fokus masih pada penentuan mekanisme. Dalam waktu dekat, rapat pimpinan akan digelar untuk merumuskan langkah berikutnya. Organisasi harus jalan. (her)

Sidang Korupsi DAK Pertanian:...

Sambungan dari hal 12

Sebabnya, temuan ini sinkron dengan keterangan ahli konstruksi dan LKPP yang sudah dihadirkan sebelumnya.

Dalam perkara ini, 12 orang duduk di kursi pesakitan. Mulai dari mantan

Kadis Pertanian Kaur, Lianto, hingga jajaran pejabat fungsional dan sembilan kontraktor. Mereka harus bertanggung jawab atas empat paket pekerjaan yang tersebar di Desa Air Kering II, Bandu Agung, Tanjung Aur II, dan Desa Sumber Harapan. (wjt)

Buruh Batako Menangis,...

Sambungan dari hal 12

"Kami ingin memastikan Polri hadir bukan cuma saat ada kasus," tegas Irjen Pol Mardiyono. Menurutnya, aksi sosial ini adalah bentuk kepedulian nyata bagi warga yang memang membutuhkan uluran tangan.

Bukan cuma bedah rumah. Di lokasi yang sama, jenderal bintang dua itu juga membagikan paket sembako. Suasannya adalah warga lanjut usia di sekitar Desa Babatan. Kegiatan berlangsung akrab. Tanpa sekat. Nuansa kekeluargaan begitu terasa di sela-sela adukan semen pertama untuk rumah Slamet. (wjt)

Lapak PTM Dibongkar, Pemkot...

Sambungan dari hal 12

"Kami minta aparat segera menindaklanjuti dugaan pengrusakan batas tanah," ujar kuasa hukum ahli waris, Suhartono, SH.

Kasusnya masih jalan. Di sisi lain, Pemkot mengaku akan menata ulang pedangan agar tidak memicu masalah baru. Lokasi relokasi sedang dicari. Pedagang menunggu. (her)

Seleksi Paskibraka Provinsi...

Sambungan dari hal 12

"Hari ini (kemarin, red) adalah titik awal perjalanan kalian. Setiap tahapan bukan hanya menguji fisik, tetapi juga membentuk mental," ujarnya.

Targetnya jelas. Nasional. Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilimi, berharap peserta terbaik bisa menembus tingkat pusat, bahkan sampai Istana Negara.

"Kami berharap bisa mengharumkan nama Bengkulu," katanya. Di sisi lain, seleksi tingkat kota juga

belum sepenuhnya selesai. Dari 273 pendaftar di Kota Bengkulu, tersisa 36 pelajar. Enam di antaranya sudah dikirim ke provinsi untuk bersaing lagi.

Persaingan makin ketat. "Keenam peserta ini masih harus bersaing lagi. Belum tentu semuanya lolos," ujar Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu, Saipul Apani. Yang gagal, kembali ke daerah. Mereka akan mengisi formasi Paskibraka tingkat kota. Penetapan akhir dijadwalkan sekitar Juli 2026 sebelum masuk masa karantina. (her)

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN Pemimpin Umum: HJ. NURBAITI, General Manager/Penanggung Jawab: PATRIS MUWARDI, Manajer Personalia: MARSAL ABADI, Pemimpin Perusahaan: HJ. NURBAITI, Wakil Pemimpin Perusahaan: -, Pemimpin Redaksi: RIKY DWI PUTRA, Redaktur: FAZLUR RAHMAN, ADE HARYANTO, M. RIZKI AHANDA LUBIS, Wartawan: KADE WESJESTORINDO, RENDI DWIPRANOTO, OKI IBERANSYAH, HENDRI SAPUTRA, Wartawan di Daerah: FIRMAN SYAH (Mukomuko), HERU PRAMANA PUTRA (Kepahiang), FIKI SUSANDI (Seluma), RUSMAN AZIZAL (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Rejang Lebong), ABDI LATUL FATWA (Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), Sekretaris Redaksi: ANNA MARIYOHANA PRACAT: SUTAMIRIN (Kabag), FRAN SINATRA, HENDRA IRRAWAN PUTRA, REFJINDO, HEFFY JUNAIDI, Telokinfo Informasi (TI): ZULHAMDI, VORWANTO Manajer Iklan: SUMARLIN, Account Executive (AE): M. IRFANSYAH, AMALUDIN HAKIM, Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran: STAF: FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, Design Iklan: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, Manajer Pemasaran: MASRI YADI, Staf Pemasaran: SULISTI HARTINI, SAMRISMAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, JULIMAN HADI, DESTI, Manajer Keuangan: ANAG SUWARSONO, Accounting: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, Event Organizer (EO): DIVISI Anak Perusahaan: SUKATNO, JEFFRI GINTING, M. RASUL, SOPYAN ARDI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M. BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA, Penerbit: PT SEMARAK BENGKULU PERMAI, Komisaris Utama: DWI NURMAWAN, Komisaris: LUKMAN SETIAWAN, HM. MUSLIMIN, MH. Direktur Utama: H. SUPARNO WONOKROMO, Direktur: HJ. NURBAITI, Corporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu: Dr. Harris Arthur Hedra, SH, MH, Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P. Natadirdja No. 69 KM 6.5 Bengkulu, Telepon (0736) 20882, 23060, 341694, 344754, 346771 Faximile (0736) 346770 Perwakilan Jakarta: Graha Pena Jakarta Lantai 6 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021) 53699581 Fax (021) 53651427 Percetakan: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, Manajer Percetakan: JOKO SANTOSO, Operasional Percetakan: ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, TRIGONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRINDONI, RUDI HARTONO, AGUNG SYAPUTRA SAHAWAN, Alamat Percetakan: Jalan WR. Supratman RT 01 Kelurahan Belitling, Kecamatan Muara Bangkulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842, Tarif Iklan: Display (umum) Rp 47.500/mmk, sosial/keuangan/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mimik Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (mimik 1/4 halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 warna), dan Rp 62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000/perbulan, belum termasuk ongkos kirim. - Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Rp26 Miliar Dana Bansos Sudah Disalurkan, Triwulan Kedua Penerima Berkurang 7.460

ARGA MAKMUR – Sebanyak 40.274 warga miskin di Bengkulu Utara sudah menerima penyaluran dana bantuan sosial untuk triwulan pertama. Dana bantuan sosial tersebut adalah program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 40.247 warga kurang mampu penerima manfaat sosial tersebut masing-masing 13.272 keluarga penerima program keluarga harapan. Sedangkan untuk penerima manfaat program bantuan pangan non tunai

sebanyak 27.002 keluarga. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajat, SKM, MM menyampaikan jika total ada Rp 9,9 Miliar dana sudah disalurkan untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Ditambah lagi sebesar Rp16,2 Miliar untuk keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non tunai. “Dananya triwulan pertama tersebut sudah disalurkan ke masing-masing rekening bantuan sosial penerima manfaat,” terangnya.

Namun dari danta yang diterima oleh Dinas Sosial Bengkulu Utara, jumlah penerima program bantuan sosial PKH dan BPNT untuk triwulan kedua ini akan terjadi pengurangan cukup besar. Total ada 7.460 penerima yang dicoret atau tidak menerima lagi pada triwulan kedua. Penerima PKH turun dari total 13.272 untuk triwulan pertama pada triwulan kedua nanti menjadi 12.422 keluarga. Sedangkan untuk keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non tunai menjadi 20.392 dari triwulan pertama

lalu sebanyak 278.002 keluarga. Penurunan ini terjadi karena pemutakhiran data yang terus dilakukan. “Pemutakhiran data tersebut terus dilakukan dan dilakukan oleh desa-desa melalui operator sosial yang ada di desa,” terangnya. Pemkab Bengkulu Utara juga sudah mengajukan untuk penyaluran program bantuan sosial triwulan kedua tersebut dalam waktu dekat ini. Nantinya penyaluran akan dilakukan oleh bank himbara yang ditunjuk masing-masing ke rekening masing-

masing keluarga penerima manfaat. Ditambahkan Agus, program bantuan sosial tersebut berperan sangat besar untuk kondisi ekonombi di Bengkulu Utara. Triwulan pertama, total ada Rp26 Miliar lebih dana bantuan sosial yang disalurkan ke warga-warga penerima manfaat di Bengkulu Utara. Jumlah ini bukan hanya menjaga daya beli keluarga kurang mampu di Bengkulu Utara, namun juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Bengkulu Utara. (qia)



MASRUP

Rp9 Miliar Opsen Pajak Kendaraan Bermotor jadi Pendapatan Terbesar

ARGA MAKMUR – Kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sepertinya akan masuk atau pendapatan asli daerah sektor pajak daerah terbesar. Sampai saat ini, opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara Masrup, M.Si menyampaikan jika saat ini sudah ada Rp 9 Miliar yang menjadi pendapatan asli daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar sampai saat ini dibandingkan sumber pendapatan pajak daerah yang menjadi tanggungjawab Bapenda.

“Capaian ini tentunya menjadi hal yang positif, terutama pada pendapatan asli daerah yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu sumber pembangunan daerah,” terangnya.

Ia juga menyampaikan jika saat ini ada kebijakan Pemda Provinsi Bengkulu terkait dengan penghapusan denda pajak.

Hal ini juga sebagai salah satu signal positif dan diyakini akan terus meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Karena saat ini kita terus mendorong peningkatan pendapatan daerah semua sektor,” ujarnya.

Dengan terus meningkatnya pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya masing-masing.

Selain itu, Bapenda Bengkulu Utara juga akan terus melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang menjadi kewenangan pajak daerah, termasuk juga pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

“Saat ini semua sektor pajak tengah kita dorong untuk meningkat sehingga pendapatan asli daerah bisa meningkat, termasuk dengan berbagai kemudahan sistem pembayaran yang saat ini sudah menggunakan sistem aplikasi,” pungkash Masrup. (qia)



TERIMA: Bupati Arie menerima forum kepala desa Kecamatan Padang Jaya di rumah pribadinya.

SANDIRI

Soal Pembangunan Wilayah, Bupati Arie Diskusi Dengan Forum Kades Padang Jaya

ARGA MAKMUR – Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.Ap menunjukkan jika pembangunan yang saling bersinergi dikedepankan di Bengkulu Utara. Sinergitas ini bukan hanya antara pemerintah kabupaten dengan Pemda Provinsi maupun pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sehingga kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berdampak besar bagi masyarakat. Siang kemarin, Bupati Arie menerima forum kepala desa Kecamatan Padang Jaya di rumah pribadinya. Bupati Arie berdiskusi panjang

terkait dengan pembangunan wilayah.

“Dalam diskusi ini kita menyatukan antara target pembangunan pemerintah daerah, dengan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi sasaran pembangunan,” terangnya.

Ia menyampaikan jika hal ini sangat positif, sehingga pemerintah daerah dengan pemerintah desa menjadi satu kesatuan pemerintah yang memiliki kesamaan target dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan.

Sehingga setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

“Sangat penting diskusi seperti ini dalam rangka memastikan program pembangunan yang dilaksanakan

benar-benar tepat sasaran yang artinya bisa menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan,” terangnya.

Saat ini pemerintah daerah tengah mendorong percepatan pembangunan.

Sehingga investarisasi masalah ditengah yang ada di masyarakat yang berhasil dihimpun masing-masing kepala desa sangat penting menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan program percepatan pembangunan.

Ia juga menyampaikan setiap wilayah memiliki permasalahan spesifik yang berbeda-beda.

“Saat ini kita mendorong percepatan pembangunan di tiap wilayah, program percepatan pembangunan ini untuk menjawab kebutuhan

pembangunan di masing-masing wilayah sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Ditambahkan Arie, pemerintah desa juga mengelola anggaran untuk pembangunan yang berasal dari dana desa.

Ia juga meminta pembangunan yang dilaksanakan melalui dana desa juga saling bersinergi dengan arah atau target pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih besar oleh masyarakat. Saat ini hubungan sinergitas antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat terjalin bagus dan tentunya hal ini positif dalam pembangunan,” pungkash Arie. (qia)

Dana Beasiswa Langsung ke Universitas, Ada Standar IPK Tiap Semester

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara saat ini mulai melakukan seleksi calon penerima beasiswa perguruan tinggi.

Saat ini tahapan seleksi calon penerima beasiswa perguruan tinggi masih dalam tahap pendaftaran peserta secara online.

Kabag Kesra Setda Bengkulu Utara Darlinsyah menyampaikan jika masing-masing penerima beasiswa akan menerima Rp 4 Juta setiap semesternya.

Namun dana tersebut adalah dana

pendidikan yang akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing kampus tempat peserta menempuh pendidikan tinggi.

“Sehingga kita tidak menyalurkan dana beasiswa tersebut pada penerima beasiswa melainkan langsung ke kampus. Sehingga dana tersebut benar-benar menjadi biaya pendidikan bagi penerima beasiswa,” terangnya.

Sejauh ini penyaluran beasiswa akan diberikan selama 4 semester atau selama dua tahun.

Namun selama menjadi penerima

beasiswa, masing-masing mahasiswa ini juga wajib mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setinggi 2,75.

“Jika memang IPK dibawah 2,75, maka kita nilai mahasiswa atau penerima beasiswa tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa,” terangnya.

Standar IPK ini juga diterapkan sehingga mahasiswa atau penerima beasiswa bukan hanya berprestasi saat di tingkat sekolah menengah sehingga terpilih menjadi penerima

beasiswa.

Namun mereka juga harus terus mempertahankan prestasinya.

“Karena tujuan Pak Bupati, program beasiswa perguruan tinggi ini bukan hanya membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, namun juga memicu penerima untuk terus berprestasi secara akademik,” terangnya.

Ditambahkannya, untuk calon penerima beasiswa bukan hanya harus memenuhi syarat sebagai siswa berprestasi saat duduk di sekolah tingkat

menengah atas.

Namun mereka juga harus tergolong masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan masuk dalam kategori keluarga dalam Desil I sampai Desil V Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data tersebut adalah data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang menjadi standar kualitas sosial tiap keluarga termasuk juga menjadi standar keluarga berhak menerima program bantuan dari pemerintah atau tidak. (qia)

**DAPATKAN KORAN RB
VERSI FULL COLOR**

**DENGAN BERLANGGANAN
EPAPER RB
GRATISSSS!!!**

Download EPAPER RB dari playstore di handphone android anda

INFORMASI LEBIH LENGKAP
HUBUNGI

**0852 6854 7888
0811 737 421**

Program Bioflok di Mukomuko, Wajib Lewat Koperasi Desa

MUKOMUKO - Peluang baru mulai terbuka. Warga Mukomuko kini didorong beralih ke budidaya ikan sistem bioflok yang lebih hemat lahan dan pakan.

Program ini mulai digulirkan pemerintah pusat dan diarahkan masuk ke daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Senin, 5 Mei 2026, Dinas Perikanan setempat mulai menyiapkan skema pelaksanaannya di tingkat desa.

Tak bisa sembarangan. Akses program ini tidak diberikan ke perorangan. Pemerintah mensyaratkan seluruh kegiatan harus melalui Koperasi Desa Merah Putih agar pengelolaan lebih rapi dan terkontrol.

"Program bioflok ini sudah mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat, dan daerah tinggal menyesuaikan pelaksanaannya," ujar Kepala Dinas Perikanan Mukomuko, Rahmad Hidayat, SPi, MSi.

Ia menegaskan, pola koperasi dipilih bukan tanpa alasan. Pengalaman sebelumnya, bantuan yang berjalan sendiri-sendiri kerap tidak bertahan lama.

"Pelaksanaannya tidak bisa perorangan, harus melalui koperasi. Ini supaya pengelolannya lebih terkontrol dan berkelanjutan," katanya.

Dalam skema yang disiapkan, setiap koperasi



BUDDIDAYA: Media kolam Bioflok mulai digunakan pembudidaya ikan tawar di Mukomuko.

akan mendapat tiga titik kolam bioflok. Tiap titik dikelola kelompok pembudidaya yang tergabung dalam koperasi tersebut.

Tiga titik. Satu koperasi. Model ini diharapkan tetap memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat, tanpa kehilangan kendali dalam pengelolaan.

"Setiap koperasi mendapat tiga titik kolam, dan masing-masing titik dikelola oleh satu kelompok pembudidaya," jelas Rahmad.

Peluangnya masih terbuka. Kelompok masyarakat yang siap dipersilakan mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan Mukomuko. Prosesnya mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Bagi kelompok yang siap, silakan ajukan permohonan. Nanti akan kita proses sesuai mekanisme," ujarnya.

Di lapangan, sistem bioflok dikenal cukup efisien. Kolam tidak perlu luas, dan biaya pakan bisa ditekan karena limbah diolah menjadi nutrisi tambahan melalui mikroorganisme. Lebih hemat. Lebih cepat panen. "Keunggulan bioflok ini ada pada efisiensi pakan dan

lahan, serta mampu meningkatkan produktivitas," sampai Rahmad.

Tak hanya produksi ikan. Pemerintah juga mendorong koperasi menjadi pusat kegiatan usaha, mulai dari pengelolaan hingga pemasaran hasil budidaya. "Koperasi ini nantinya menjadi pusat pengelolaan usaha, termasuk distribusi dan pemasaran hasil," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan, program ini tidak akan berjalan jika kelompok tidak siap. Administrasi, anggota, hingga komitmen menjadi kunci.

"Kelompok yang ikut harus benar-benar siap. Jangan sampai program ini hanya berjalan di awal saja," tegasnya.(pir)

PROGRAM BIOFLOK DI MUKOMUKO:

- 1 KOPERASI: 3 titik kolam bioflok
- 1 TITIK: dikelola 1 kelompok pembudidaya
- SISTEM BIOFLOK: hemat lahan dan pakan
- Program berasal dari pemerintah pusat
- Pelaksanaan wajib melalui koperasi desa



EDUKASI: Kepsek Mukomuko mendapat pencerahan terkait kerja berbasis aplikasi

122 Jabatan Kepsek Kosong di Mukomuko, Mutasi Tunggu Akhir Tahun Ajaran

MUKOMUKO - Sebanyak 122 kursi kepala sekolah di Mukomuko belum terisi. Kekosongan ini mulai mengganggu jalannya manajemen sekolah. Langkah mutasi mulai disiapkan. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merancang pergeseran kepala sekolah untuk menutup kekosongan yang menumpuk.

Rabu, 5 Mei 2026, rencana itu masih dalam tahap pematangan. Waktunya tidak sembarangan.

"Mutasi kepala sekolah memang sedang kita siapkan, tapi harus dikaji secara matang dan tidak boleh mengganggu proses kegiatan belajar mengajar," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mukomuko, Arni Gusnita, S.Pd, MM.

Tidak bisa buru-buru. Mutasi diproyeksikan menjelang akhir tahun ajaran 2025-2026. Momen ini dianggap paling aman agar tidak berbenturan dengan ujian sekolah maupun kenaikan kelas.

"Kita pertimbangkan waktunya, jangan sampai mutasi justru mengganggu KBM, apalagi menjelang ujian dan kenaikan kelas," katanya.

Data di lapangan menunjukkan tekanannya nyata. Dari total 122 jabatan kosong, 60 kepala sekolah sudah habis masa jabatan, 55 sekolah masih dipimpin pelaksana tugas, dan 7 lainnya ditinggalkan karena pengunduran diri.

Angkanya besar. "Data kita ada 122 jabatan kepala sekolah yang kosong, ini tentu harus segera kita isi agar roda organisasi sekolah berjalan optimal," jelas Arni.

Di balik itu, ada persoalan lain. Tidak semua guru bisa langsung dipromosikan. Syaratnya ketat. Kepala sekolah harus punya

sertifikat calon kepala sekolah (Cakep), pangkat minimal III/C, sertifikat pendidik, hingga pengalaman jabatan administratif. Masalahnya, yang memenuhi belum banyak.

"Untuk sertifikat Cakep, saat ini baru ada sekitar enam orang yang memiliki. Ini menjadi kendala tersendiri," ungkapnya.

Jumlah itu jauh dari cukup.

Di Mukomuko, bahkan di tingkat Provinsi Bengkulu, pelatihan calon kepala sekolah belum pernah digelar. Akibatnya, stok kandidat terus minim.

"Di Mukomuko bahkan di Provinsi Bengkulu belum pernah ada diklat calon kepala sekolah, jadi ini yang perlu kita dorong ke depan," jelasnya.

Peran kepala sekolah tak bisa dianggap ringan. Mereka bukan hanya mengurus administrasi, tapi juga menentukan arah dan suasana belajar di sekolah. "Kepala sekolah harus memahami tugasnya, bagaimana menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan memahami tujuan pendidikan itu sendiri," ujarnya.

Masalahnya belum selesai. Selama kursi kosong masih banyak, beban sekolah akan tetap timpang. Mutasi jadi pilihan, tapi ketersediaan orang tetap penentu.(pir)

KURSI KEPSEK KOSONG:

- ◆ 122 jabatan kepala sekolah kosong
- ◆ 60 habis masa jabatan
- ◆ 55 dijabat pelaksana tugas
- ◆ 7 kepala sekolah mengundurkan diri
- ◆ Baru sekitar 6 orang punya sertifikat Cakep

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Posisi Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko Makmur

Periode Laporan : Desember 2025

Saldo Awal Periode : 1.237.118.200

Saldo Akhir Periode : 1.237.118.200

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Laba Rugi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko Makmur

Periode Laporan : Desember 2025

Saldo Awal Periode : 1.237.118.200

Saldo Akhir Periode : 1.237.118.200

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Posisi Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko Makmur

Periode Laporan : Desember 2025

Saldo Awal Periode : 1.237.118.200

Saldo Akhir Periode : 1.237.118.200

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Laba Rugi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko Makmur

Periode Laporan : Desember 2025

Saldo Awal Periode : 1.237.118.200

Saldo Akhir Periode : 1.237.118.200

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Posisi Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko Makmur

Periode Laporan : Desember 2025

Saldo Awal Periode : 1.237.118.200

Saldo Akhir Periode : 1.237.118.200

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Laba Rugi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko Makmur

Periode Laporan : Desember 2025

Saldo Awal Periode : 1.237.118.200

Saldo Akhir Periode : 1.237.118.200

Pria Mengamuk di Desa Pauh Terenja Mukomuko Dievakuasi ke RSJ

MUKOMUKO - Aksi mengamuk seorang warga di Desa Pauh Terenja bikin resah. Warga akhirnya turun tangan, pria itu diamankan.

Ketegangan sempat terasa di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Beberapa hari terakhir, seorang pria tiba-tiba bertingkah agresif dan membuat warga waspada.

Puncaknya Selasa, 5 Mei 2026. Pria itu akhirnya diamankan bersama aparat desa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mukomuko. Evakuasi dilakukan untuk mencegah hal yang lebih buruk.

"Benar, yang bersangkutan adalah warga kami, dan beberapa hari terakhir memang sempat mengamuk hingga meresahkan masyarakat," ujar Kepala Desa Pauh Terenja, Rodi Hartono.

Identitasnya jelas. Arianto (45), duda yang sudah lama tinggal sendiri di rumahnya. Warga mengenalnya biasa saja. Tidak pernah bikin masalah.

"Selama ini tidak pernah seperti itu. Baru kali ini dia sampai mengamuk dan membuat warga khawatir," kata Kades.

Perubahannya mendadak. Dugaan sementara, ia berhenti mengonsumsi obat penenang yang biasa diminum. Kondisinya lalu tidak terkendali.

"Kami menduga dia kehabisan obat, sehingga penyakit lamanya kambuh dan tidak terkendali," jelasnya.

Risikonya besar. Warga dan keluarga sepakat tidak menunggu lebih lama. Langkah pengamanan diambil agar situasi tidak meledak.

"Untuk menghindari risiko yang lebih besar, warga bersama keluarga dan Pemdes sepakat untuk mengamankan yang bersangkutan," ujarnya.

Evakuasi dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Arianto sempat dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melengkapi administrasi. Setelah itu, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Bengkulu.

"Untuk kelengkapan administrasi, sempat dibawa ke Dukcapil, baru kemudian langsung dibawa ke RSJ Bengkulu," jelasnya.

Keluarga menyetujui. Langkah itu diambil agar Arianto bisa mendapat penanganan medis yang tepat. "Keluarga juga sudah setuju untuk dibawa berobat ke RSJ, agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat," ujarnya.

Arianto diketahui sudah lama hidup sendiri. Sekitar 14 tahun sejak bercerai, ia tinggal tanpa pendamping.

Pengawasan terbatas. "Dia memang tinggal sendiri sejak lama, jadi tidak ada yang memantau secara rutin," pungkasnya.

Situasi sudah mereda. Tapi kewaspadaan warga masih terasa.(pir)



PERIKSA: Sesaat diamankan petugas.



SEPI: Tampak suasana pelayanan kantor BKD yang diketahui OPD yang ikut mencatat pencairan DD/ADD.

ABDI/RB



Kabag Kesra Setkab Lebong, Riskal Efendi, SH,

Kafilah Lebong Terbatas di MTQ Bengkulu 2026, Tetap Kejar Prestasi

TUBEI - Peserta terbatas, target tak diturunkan. Lebong tetap pasang ambisi di MTQ Provinsi Bengkulu 2026.

Keterbatasan anggaran mulai terasa. Jumlah kafilah dipangkas, cabang lomba tak diikuti semua.

MTQ tingkat Provinsi Bengkulu dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Seluma, 11 hingga 21 Mei 2026. Lebong hanya mengirim 26 peserta.

Komposisinya tak banyak. Sebanyak 16 putri dan 10 putra, didampingi tujuh official. Dari total cabang yang dipertandingkan, hanya delapan yang diikuti.

"Kita kirim peserta ala kadarnya, tapi persiapan tetap maksimal. Saat ini para kafilah sudah menjalani pembinaan intensif agar mampu tampil optimal," ujar Kabag Kesra Setkab Lebong, Riskal Efendi, SH.

Pilihan cabang tidak asal. Fokus diarahkan ke nomor yang dianggap paling siap bersaing. Mulai dari tartil anak putra, tilawah anak putra dan dewasa, qira'at putra-putri, hingga hizil Qur'an.

Strateginya jelas. Tidak banyak, tapi dipilih yang berpeluang. Dengan komposisi terbatas, Lebong mencoba bermain di kekuatan.

Bukan sekadar lomba. MTQ juga dijadikan ajang pembinaan. Pemerintah daerah ingin kafilah mendapat pengalaman bertanding, bukan hanya mengejar podium.

"MTQ ini jadi wadah untuk menambah jam terbang sekaligus memotivasi munculnya kafilah-kafilah baru di Lebong ke depan," katanya.

Harapannya tetap sama. Meski dengan kondisi terbatas, peluang membawa pulang prestasi masih dibuka. Pembinaan terus berjalan sampai hari pelaksanaan.

"Mudah-mudahan dengan pendampingan yang saat ini dilakukan, masing-masing kafilah bisa memberikan hasil yang terbaik," pungkasnya.

Tekanannya ada. Tapi target tidak dilepas. (afa)

Pencairan Dana Desa Lebong Lambat, Baru 5 dari 93 Desa Cair

TUBEI - Pencairan dana desa di Lebong tersendat. Dari 93 desa, baru lima yang berhasil mencairkan tahap pertama.

Awal Mei belum bergerak banyak. Program pembangunan desa terancam ikut melambat.

Selasa, 5 Mei 2026. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lebong mencatat, baru lima desa yang mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama.

Jumlahnya timpang. Kelima desa itu yakni Bioa Sengok di Kecamatan Rimbo Pengadang,

Suka Negeri di Kecamatan Topos, Magelang Baru di Kecamatan Lebong Sakti, serta Lokasari dan Talang Ulu di Kecamatan Lebong Utara.

"Memang baru lima desa yang mencairkan DD dan ADD tahap pertama. Ini karena prosesnya bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan masing-masing desa," ujar Kepala Bidang PMD Lebong, Harkita Wijaya.

Masalahnya klasik. Administrasi. Banyak desa belum tuntas melengkapi berkas yang menjadi syarat pencairan. Akibatnya, proses tidak bisa bergerak cepat.

Di sisi lain, ada perkembangan lain. Sebanyak 12 desa sudah menerima ADD tahap pertama. Namun pencairannya tidak bersamaan dengan Dana Desa.

Artinya belum sinkron. Sementara itu, sekitar 60 desa sebenarnya sudah mengajukan dokumen pencairan. Berkas-berkas tersebut masih diperiksa dan diverifikasi.

"Berkas yang masuk masih kami periksa. Ini penting agar tidak ada kesalahan administrasi dalam penyaluran dana," jelasnya.

Masih ada yang belum bergerak. Sebanyak 33 desa bahkan belum mengajukan berkas sama sekali.

Kondisi ini jadi perhatian serius.

Jika dibiarkan, dampaknya langsung terasa. Program yang sudah dirancang dalam APBDes bisa tertunda. Mulai dari pembangunan fisik sampai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Batas waktunya jelas. Pengajuan harus selesai sebelum 30 Mei 2026. Jika terlambat, pencairan otomatis ikut mundur.

"Kalau terlambat, otomatis pencairan juga akan mundur. Dampaknya, kegiatan pembangunan di desa ikut terhambat," tegasnya.

Masalahnya bukan di dana. Tapi kesiapan desa. (afa)

ABDI/RB
EVAKUASI:
Tampak tim gabungan mengangkut jenazah korban hanyut di Air Kemaceak, beberapa waktu lalu



Tiga Pelajar Tewas di Air Kemaceak Lebong, Pemkab Pasang Larangan Mandi

TUBEI - Tiga pelajar tewas di Air Kemaceak, Lebong. Pemkab langsung siapkan larangan mandi di lokasi.

Duka itu belum hilang. Aliran Air Kemaceak yang menelan tiga pelajar SMA Negeri 1 Lebong kini jadi sorotan serius pemerintah daerah.

Rabu, 5 Mei 2026. Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Lebong bergerak cepat. Plang larangan mandi akan dipasang di kawasan sungai tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan

camat dan pemerintah desa setempat untuk segera memasang plang larangan mandi di Air Kemaceak," ujar Sekretaris Disparpora Kabupaten Lebong, Agus Suryadi.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Kondisi sungai dinilai berbahaya. Arusnya bisa berubah tiba-tiba, apalagi saat cuaca tidak bersahabat.

Lokasinya juga jauh dari permukiman. Pengawasan minim.

Ini yang membuat risiko kecelakaan sulit dicegah, terutama bagi pengunjung yang tidak paham karakter sungai.

Tak cukup dengan plang. Peran desa dan warga sekitar ikut didorong. Mereka diminta aktif mengingatkan siapa pun yang datang agar tidak nekat mandi atau berenang.

Edukasi dianggap penting. Tanpa itu, kejadian serupa bisa saja terulang. Apalagi kawasan tersebut mulai dikenal sebagai tempat bermain air.

Status lokasinya sendiri belum jelas. Disparpora masih akan menelusuri apakah Air Kemaceak masuk dalam daftar resmi destinasi wisata Kabupaten Lebong atau

tidak.

"Nanti akan kita cek kembali apakah lokasi itu masuk dalam kawasan wisata atau tidak," katanya.

Jika bukan kawasan wisata, penanganan akan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa. Tapi jika masuk, standar keselamatan harus diperketat.

Artinya, bisa ada petugas. Fasilitas keselamatan juga harus disiapkan.

Kejadian ini jadi peringatan keras. Tidak semua tempat yang terlihat menarik aman untuk dikunjungi. (afa)

Program Cek Kesehatan Gratis di Lebong Sepi, Baru 6.633 Warga Ikut



CEK: Tampak pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukaraja, Lebong, beberapa waktu lalu

TUBEI - Program cek kesehatan gratis di Lebong belum ramai. Dari target lebih 116 ribu warga, baru 6.633 yang ikut.

Selisihnya jauh. Target tinggi, capaian masih di bawah.

Data per Sabtu, 2 Mei 2026, partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) masih rendah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong mencatat baru 6.633 warga yang memanfaatkan layanan tersebut.

Padahal sarannya besar. Program ini ditargetkan menjangkau 90 sampai 100 persen penduduk, atau lebih dari 116 ribu jiwa.

"Partisipasi masyarakat memang

masih menjadi tantangan utama dalam program ini," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Evan Marta, SKM.

Masalahnya bukan fasilitas. Layanan sudah berjalan sejak 2025. Bahkan di awal peluncuran, sekitar 12 ribu warga sempat memanfaatkan program ini.

Namun setelah itu melandai. Upaya dorongan terus dilakukan. Sosialisasi digencarkan, tidak hanya ke masyarakat umum, tapi juga ke pelajar.

"Sosialisasi kami lakukan tidak hanya di masyarakat umum, tetapi juga menysasar pelajar melalui

kegiatan di sekolah-sekolah," katanya.

Peran puskesmas ikut didorong. Fasilitas kesehatan di tiap kecamatan diminta lebih aktif mengajak warga datang memeriksa kesehatan.

"Kami berharap puskesmas bisa lebih proaktif mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini," tambahnya.

Akses juga dipermudah. Pendaftaran kini bisa dilakukan lewat aplikasi Satu Sehat. Tapi bagi warga yang belum terbiasa, layanan manual tetap dibuka di fasilitas kesehatan.

Masalahnya kembali ke minat.

Kesadaran memeriksa kesehatan masih rendah. Padahal deteksi dini bisa mencegah penyakit jadi lebih parah.

Evan menilai ini pekerjaan bersama. Perlu dorongan dari desa, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat agar warga lebih peduli.

"Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis program CKG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Lebong," pungkasnya.

Target masih jauh. Waktu terus berjalan. (afa)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH REJANG LEBONG

“Bersama Kita Wujudkan RSUD Rejang Lebong Menjadi Pusat Rujukan Regional dengan Pelayanan Berkualitas, Profesional dan Mandiri”

Dr. H. Hendri Praja, S.STP, M.Si
Plt. Bupati Rejang Lebong

drg. Asep Budi Setiawan
Plt. Direktur



Pimpinan dan Anggota Beserta Staf Sekretariat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

“Mari Wujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang Kredibel, Kapabel, Akseptebel serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Demokrasi”

Juliansyah Yayan
Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Pera Haryani, SE
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Lukman Effendy, SH
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Syamsir, SKM, MKM
Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Resahkan Warga, Polisi Diminta Rutin Patroli Geng Motor

Jangan Sampai Korban Bertambah

CURUP - Sepekan terakhir, masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong kembali diresahkan aksi remaja yang konvoi di jalan raya mengendarai motor sembari menghunus senjata tajam.

Bahkan aksi yang dikenal sebagai komplotan geng motor itu sempat menimbulkan korban.

Yakni 5 pengendara motor yang melintas di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup Jumat dini hari 1 Mei 2026.

Walaupun tidak sampai merenggut nyawa, namun ketiga korban mengalami luka akibat senjata tajam dan pukulan benda keras.

“Kami minta Polres Rejang Lebong lebih maksimal lagi dalam menjaga keamanan, alangkah baiknya kalau kepolisian menggiatkan patroli di malam hari dengan target khusus geng motor,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Hidayatullah, S.Pd.I.

Apalagi sejauh ini pelakunya belum tertangkap sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Khususnya para orang tua yang memiliki anak laki-laki usia remaja karena umumnya sasaran para pelaku adalah remaja



MERESAHKAN: Aktivitas remaja yang diduga geng motor kembali marak di Rejang Lebong.

laki-laki.

Jika tidak dilakukan antisipasi sedini mungkin, dikhawatirkan aksi geng motor akan semakin meluas sebagaimana yang ramai terjadi di wilayah luar

Bengkulu.

Para orang tua juga diharap lebih ketat lagi dalam mengawasi aktivitas anaknya, baik saat di rumah maupun ketika sedang berada di luar rumah.

“Soalnya geng motor ini seolah sedang tren di kalangan remaja, lihat saja sendiri beberapa remaja yang tidak takut mengunggah aktivitasnya sebagai pelaku geng motor di media

sosial,” terang Hidayatullah.

Sementara Kapolres Rejang Lebong, AKBP. Florentus Situngkir, S.IK melalui Kasi Humas, AKP. Hasan Basri, SH memastikan akan menggiatkan kembali patroli dengan sasaran khusus para remaja geng motor. Bahkan Selasa 5 Mei 2026, pihaknya sempat mengamankan 8 remaja yang diduga pelaku geng motor.

Kendati tidak diproses hukum lebih lanjut mengingat statusnya yang masih di bawah umur dan pelajar, masing-masing pelaku sempat ditahan sebagai pembinaan. Masing-masing pelaku juga telah membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi perbuatannya.

“Jika pelaku kembali mengulangi perbuatannya, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum,” tukas Hasan.

Delapan remaja yang diduga komplotan geng motor itu diamankan setelah sempat mengunggah aksinya konvoi di jalan raya mengendarai motor sembari menghunus senjata tajam di kawasan Jalan Sukowati dekat rumah dinas Kapolres Rejang Lebong.

Ternyata 6 pelaku masih tercatat sebagai pelajar SMA di Rejang Lebong dan 2 pelaku lagi berstatus putus sekolah. (sca)



FIRMANSYAH

Dewan Minta Percepat Lelang Proyek

CURUP - Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2026, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Rejang Lebong diminta lebih cekatan. Proses lelang harus dipercepat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau bisa sebelum triwulan kedua berakhir, lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah selesai semua sehingga tidak ada lagi proyek luncuran tahun ini,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Firmansyah, SE kepada RB.

Proses lelang barang dan jasa harus mengedepankan tujuan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya harus ada pengawasan ketat terhadap kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Rejang Lebong.

“Jangan sampai dalam prakteknya, UKPBJ justru menjadi agen segelintir oknum dalam mencari keuntungan sepihak dengan cara yang melanggar aturan,” ungkap Firmansyah.

Senada disampaikan tokoh masyarakat Rejang Lebong, Drs. Abdul Muthalib yang mengklaim kinerja UKPBJ untuk lelang kegiatan tahun 2025 sangat tidak memuaskan masyarakat. Sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak bisa diakses karena kurangnya komitmen mengenai transparansi informasi publik.

“Kami harap di tahun 2026 ini UKPBJ lebih transparan terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa agar lebih memudahkan masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan,” ujar Muthalib.

Sementara Kepala BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Zerli Lawdy, SH belum berhasil dikonfirmasi. Alhasil belum bisa dipastikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang sudah melimpahkan berkas pra lelang kegiatannya. (sca)



LONGSOR: Tim dari BPBD Rejang Lebong mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan di Kecamatan Sindang Kelingi.

Longsor, Akses Jalan di Sindang Kelingi Sempat Lumpuh 8 Jam

CURUP - Bencana longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, persisnya di Desa Air Dingin, Kecamatan Sindang Kelingi.

Dalam kejadian Senin malam 4 Mei 2026 itu, material longsor menutup penuh badan jalan sehingga akses penghubung Desa Air Dingin dengan Desa 4 Suku Menanti itu sempat terputus total selama 8 jam.

Tim penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong baru bisa turun ke lokasi Selasa pagi 5 Mei 2026.

Akses jalan baru bisa dilewati kendaraan roda empat pukul 09.30 WIB setelah material longsor beru-

pa tanah dan pohon yang tumbang berhasil dievakuasi.

“Ini merupakan bencana longsor perdana yang terjadi sejak cuaca ekstrem melanda Kabupaten Rejang Lebong sebulan terakhir,” kata Kepala BPBD Rejang Lebong, M Budianto, ST melalui Kasi Kedaruratan, Rio Agustian Pakpahan, SE.

Meski kondisi cuaca telah berangsur normal, BPBD tetap mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Soalnya potensi hujan dengan intensitas tinggi sewaktu-waktu masih bisa terjadi dengan resiko yang dapat memicu bencana alam lanjutan.

Khusus kepada warga yang ting-

gal di sekitar aliran sungai, diharapkan selalu waspada terhadap kemungkinan banjir bandang akibat meluapnya debit air.

Begitu juga masyarakat yang bermukim di kawasan perbukitan atau sekitar tebing, diingatkan selalu berhati-hati terhadap potensi longsor susulan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap siaga, terutama yang berada di wilayah rawan bencana dan ketika muncul tanda-tanda bahaya, segera lakukan langkah antisipasi dengan segera menjauhi lokasi,” terang Rio.

Sementara tokoh masyarakat Rejang Lebong, M Suraji, S.Sos meminta BPBD tidak hanya berfokus terhadap penanganan pasca

bencana.

Namun tindakan antisipasi seperti pembangunan pelapis tebing dan pemasangan beronjong sungai harus dioptimalkan.

Artinya BPBD harus punya data yang akurat terkait titik rawan bencana di setiap kecamatan dan kelurahan/desa.

Dengan adanya pemetaan yang riil, setidaknya setiap potensi bencana sudah dapat terprediksi lebih dini.

“Melalui data potensi bencana itu, daerah bisa mengusulkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana pencegah bencana ke pemerintah pusat kalau memang anggaran daerah minim,” ungkap Suraji. (sca)



HERMAN ZAMZARI

90 Desa dan Kelurahan Tak Miliki Lahan Bangun Koperasi Merah Putih

KEPAHIANG - Progres pembangunan koperasi desa dan kelurahan merah putih di Kabupaten Kepahiang tersendat. Ini lantaran, 90 desa dan kelurahan di Kabupaten Kepahiang diketahui tak memiliki lahan untuk membangun Koperasi Merah Putih.

Dari total 117 desa dan Kelurahan yang ada, sejauh ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang mendata baru 4 koperasi desa dan kelurahan saja dinyatakan siap operasi.

Pembangunan 4 koperasi desa dan kelurahan dinyatakan tuntas 100 persen terdapat di Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi, Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi, Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan dan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermami Ilir.

Terdapat pula, 23 Koperasi desa dan kelurahan merah putih masih dalam proses pembangunan. Kadis Perindag UKM dan Koperasi Kabupaten Kepahiang, Herman Zamzari, S.PKP, MP terdapat 27 desa/kelurahan dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih.

"Dari jumlah yang berproses, 4 koperasi tuntas pembangunannya," kata Herman.

Terkait badan hukum, ia memastikan semua koperasi di Kabupaten Kepahiang sudah memilikinya. Untuk proses lanjutan terhadap koperasi yang sudah dibangun, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Sesuai tujuan awal, pendirian koperasi merah putih untuk membangkitkan ekonomi desa melalui badan usaha berupa Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama.

Koperasi Merah Putih ini sendiri, bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan cermin semangat kemandirian dan ketahanan desa.

Adapun skema pinjaman Koperasi Desa Merah Putih adalah, setiap koperasi desa/kelurahan akan mendapatkan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp3 miliar dengan batas maksimal penggunaan pinjaman untuk belanja operasional sebesar Rp500 juta.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi koperasi yang dibentuk secara gabungan oleh beberapa desa atau kelurahan. Adapun tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun. Jangka waktu (tenor) pinjaman ditetapkan maksimal selama 72 bulan atau 6 tahun.

Lalu, masa tenggang (grace period) selama 6 hingga 8 bulan dengan mempertimbangkan kapasitas usaha dari masing-masing koperasi. Periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Bagi koperasi yang ingin mengakses pembiayaan tersebut harus memenuhi enam syarat dasar, telah berbadan hukum koperasi, memiliki Nomor Induk Koperasi (NIKop), memiliki rekening bank atas nama koperasi.

Kemudian, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyusun proposal bisnis yang memuat rincian anggaran belanja modal dan/atau operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembaliannya.

Di samping keenam persyaratan tersebut, bank juga diperbolehkan menetapkan kriteria tambahan sesuai peraturan berlaku guna memastikan akuntabilitas penggunaan pinjaman.

Sebelum pinjaman disalurkan, koperasi juga wajib memperoleh persetujuan dari kepala daerah, baik bupati/wali kota untuk tingkat kelurahan maupun kepala desa untuk tingkat desa.

Persetujuan tersebut tidak serta-merta, melainkan harus melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa atau kelurahan.

Selain menyetujui pengajuan pinjaman, musyawarah ini juga menjadi dasar dalam pemberian izin penggunaan dana desa, dana alokasi umum (DAU), maupun dana bagi hasil (DBH) sebagai jaminan pengembalian pinjaman.

Selain fasilitas subsidi bunga, dukungan penuh pemerintah terhadap koperasi merah putih juga diberikan dalam bentuk intercept yaitu instrumen jaminan pemerintah jika koperasi mengalami gagal bayar angsuran ke bank. Instrumen tersebut bersumber dari dana desa untuk koperasi merah putih atau DAU/DBH. (oce)



BERGULIR: Rekonstruksi kematian tragis Gita Fitri dilakukan beberapa waktu lalu. Saat ini perkaranya sudah berada di kejaksaan.

Tambah Pasal Pembunuhan di Perkara Kematian Gita

KEPAHIANG - Sempat dikembalikan Berkas Perkara (BP) kematian tragis Gita Fitri Ramadani (25), warga Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu telah diterima lagi JPU Kejari Kepahiang.

Di sini, ada pasal tambahan yang ikut disertakan pada BP kematian Gita Fitri dibawa ke JPU.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kepahiang Ahmad Yantomi, Selasa 5 Mei 2026 menerangkan masih akan memeriksa kembali BP perkara kematian Giita yang baru saja dilimpahkan kembali oleh penyidik Polres Kepahiang.

"Sebelumnya memang kita kembalikan. Setelah ada koordinasi, ada pasal tambahan pembunuhan dalam berkas perkara ini," terang Ahmad.

JPU juga lanjutnya, meminta penyidik menyertakan bukti tambahan. Seperti digital forensik berupa rekaman percakapan antara Tsk Mu dan korban Gita lewat Handphone.

"BP nya akan kita periksa dulu, apakah petunjuk yang kita sampaikan lalu sudah dipenuhi atau tidak. Seperti data forensik. Dari sini kan nanti akan tergambar, siapa yang pertama kali meminta korban datang ke pondok," tambah Kasi Pidum.

JPU meminta agar penyidik melengkapi alat bukti, khususnya bukti forensik digital. Bukti berupa percakapan antara korban dan tersangka, yang diduga berkaitan dengan keberadaan korban di lokasi kejadian.

"Dalam waktu 14 hari setelah berkas masuk, akan kita koordinasikan kembali terkait apa saja yang perlu dilengkapi.

Termasuk bukti forensik digital, apakah ada percakapan antara tersangka dan korban hingga korban datang ke lokasi kejadian," tambahya.

Semula, tersangka dijerat dengan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Namun, seiring perkembangan pe-

nyidikan dan penguatan alat bukti, perkara ini kini mengarah pada kemungkinan penerapan pasal yang lebih berat, yakni dugaan pembunuhan.

Kematian Gita pada Rabu 4 Februari 2026 dinihari masih menimbulkan tanda tanya besar, khususnya di kalangan keluarga.

Tak heran jika kemudian, pihak keluarga sepakat melakukan otopsi ulang dengan membongkar makam Gita pada di TPU Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu pada, Selasa 3 Maret 2025.

Dalam rekonstruksi yang baru saja digelar Polres Kepahiang, sudah digambarkan posisi Gita sudah berada di pondok kebun pada 3 Februari 2026 malam.

Gita sempat berinteraksi dengan 3 orang saksi, hingga kemudian memasuki pondok milik tersangka.

Hingga kemudian pada adegan kelima, digambarkan dalam rekonstruksi, Gita terkejut melihat ada

seseorang yang menggunakan motor mengarah ke pondok.

Karena ini pula, Gita berlari keluar pondok dan mengarah ke belakang areal pondok perkebunan pepaya.

Karena ini pula, Gita kemudian tersengat jerat babi. Ketiga saksi di dalam pondok yang mengetahui korban tersengat listrik berupaya melakukan pertolongan melepas kabel yang menjerat kaki dan tangan korban menggunakan kayu hingga parang yang dipegang saksi J.

Pada adegan kesembilan, Tsk Mu menghampiri korban yang menurut tersangka saat itu korban tidak lagi bernapas.

Sebelumnya, Tsk dijerat pasal 474 ayat 3 UU RI Nomor 1 tahun 2023 yakni, tindak pidana setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain.

Adapun ancamannya, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V sebesar Rp500 juta. (oce)

Pembangunan Sport Centre Sulit Terealisasi, Hibah Lahan BBI Tak Ada Kejelasan

KEPAHIANG - Wacana pembangunan sport centre yang diinisiasi Pemkab Kepahiang bakal sulit terealisasi. Gambarnya, sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda positif usulan hibah lahan balai benih ikan (BBI) Kelopak kepada Pemprov Bengkulu mendapat jawaban.

Sesuai proposal yang telah dilayangkan dan audiensi yang telah dilakukan sebelumnya, jika disetujui Pemprov Bengkulu maka Pemkab berencana akan membangun areal lahan BBI yang dihibahkan tersebut menjadi sport centre.

Pemprov Bengkulu seperti ini masih sulit menghibahkan seluruh usulan hibah lahan yang diajukan Pemkab Kepahiang. Meski demikian, Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, SIP tetap berupaya maksimal mewujudkan pembangunan sport centre.

Menurutnya, jika pun Pemprov berat menghibahkan seluruh usulan hibah lahan yang diajukan, diharapkan Pemprov dapat memberikan hibah setidaknya 5 hektar saja.



BBI: Di areal lahan BBI milik Pemprov Bengkulu inilah, bakal dijadikan Pemkab Kepahiang sebagai arena sport centre ke depannya.

"Walaupun tidak semuanya (usulan hibah lahan diakomodir,red), setidaknya 5 hektar saja cukup," kata Nata. Di tengah kondisi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, proses pembangunan sport

centre

tidak mudah. Sangat tak memungkinkan, jika kemudian proses pembangunan hanya akan mengandalkan keuangan daerah. APBD Kabupaten Kepahiang dipastikan tak akan sanggup membiayai pembangunan sport centre.

Mengenai kondisi ini, Pemkab akan berupaya mendapatkan dukungan pembangunan dari kementerian

terkait. Yakni, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Malah dirinya menyampaikan, sudah bertemu langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan menyampaikan harapan terkait pembangunan areal sport centre untuk kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Kepahiang.

"Ternyata, APBN itu mengkomodir hal ini. Termasuk untuk pembangunan sport centre di daerah. Ini lah yang nantinya kita kejar. Kalau hanya mengandalkan APBD, akan sangat sulit," kata Bupati Nata.

Keberadaan sport centre di Kabupaten Kepahiang, secara tidak langsung akan memberi banyak manfaat bagi daerah. Nantinya, dirancang di dalam area sport centre terdapat beberapa venue olahraga untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang.

"Ya, kita serius untuk ini (bangun sport centre,red). Sejauh ini, untuk mewujudkan pembangunan sport centre tersebut Pemkab telah melayangkan usulan hibah lahan langsung kepada Gubernur Bengkulu.

Lokasi lahan BBI yang berada di samping kantor bupati itu, diketahui memiliki luas sekitar 13 hektar.

"Begitu hibah ini disetujui, akan langsung dibuatkan Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design) atau DED-nya dan diajukan ke Kemenpora. Ini rancangan kita ke depan," ujar Nata.

Jika terealisasi, keberadaan Sport Centre yang dijanjikan bertaraf nasional itu pastinya akan menjadi ikon baru bagi Kabupaten Kepahiang. Sekaligus perwujudan janji kampanye, yang telah disampaikan Bupati Zurdi Nata saat Pilkada lalu. (oce)

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA
Hubungi :
PT. TRI GADING MAKMUR
Distributor Resmi Pelumas Pertamina
Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOU'RE DRIVING
PERTAMINA PELUMAS

PERTAMINA PELUMAS

PT. NURTANI JAYA
Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprato No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

DIJUAL TANAH DAN BANGUNAN
Luas Tanah 600 M (12M X 50M), SHM, Diatasnya Berdiri Ruko 2 pintu dengan ukuran 10M X 16M Dan berisi Waralaba Indomaret.
Harga Nego.
Alamat : INDOMARET IDF-2 Timur Indah, Jl. Timur Indah Raya Rt.13, Kel.Timur Indah Kec. Singaranpati Kota Bengkulu.
Peminat Hub :
HP.081281538768 atau 081315543028

JUAL CEPAT
RUMAH, Luas 140m2 (10m X 14m), 3 kamar (2 kamar ada kamar mandi), 2 ruang tamu, ruang keluarga, lantai keramik, Dapur, listrik token 1300 watt, PDAM, Harga 275 Juta
PEMINAT HUB :
HP.0812 8153 8768 atau 0813 1554 3028
ALAMAT : JL. TIMUR INDAH 2A BLOK. C NO. 21, RT.14, KEL.TIMUR INDAH KEC. SINGARANPATI KOTA BENGKULU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Suara Anda, Kebijakan Kami !!

Sampaikan Aspirasi Anda untuk Kabupaten Bengkulu Tengah yang Lebih Baik.

Kantor DPRD Terbuka untuk Rakyat

Fepi Suheri, S.AP Ketua DPRD, Peri Haryadi, S.Sos, M.Si Wakil Ketua I, Romli, SP Wakil Ketua II



REKONSILIASI: Dinas PMD Bengkulu Tengah saat menerkma rekonsiliasi yang diajukan oleh pemerintah desa.

Bengkulu Tengah Deadline DD 15 Juni 2026, 39 Desa Terancam Hangus

BENTENG - Dana Desa bisa hilang begitu saja. Di Bengkulu Tengah, puluhan desa belum juga bergerak. Batasnya jelas. 15 Juni 2026. Lewat dari itu, Dana Desa (DD) tahap I tidak bisa dicairkan lagi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, kondisi belum aman. Masih ada 39 desa yang belum mengajukan pencairan hingga saat ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Tengah, Marhalim, SE, MM melalui Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Hekmatan, S.Si, M.AP mengingatkan soal itu. Teges. "Sesuai ketentuan yang ada,

penyaluran DD tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2026. Maka dari itu kami meminta kepada desa yang belum mengajukan untuk segera proses berkas pengajuannya," katanya. Data terakhir, 103 desa sudah mencairkan DD tahap I. Sisanya masih tertahan di meja administrasi. Tidak sedikit. Dorongan terus dilakukan. Sebab makin cepat diajukan, makin cepat program desa berjalan. Kalau lambat, imbasnya ke pembanguan. "Kami terus mendorong agar desa yang belum untuk segera mengajukan berkas pencairan DD. Kami berharap setelah libur

lebaran nanti semua desa yang belum mengajukan pencairan DD, bisa mengajukan pencairan DD tersebut," ungkapnya. Masalahnya ada di dalam. Banyak desa belum menyelesaikan rekonsiliasi. Padahal itu syarat utama sebelum pengajuan. Buntu di situ. Kalau rekonsiliasi selesai, langkah berikutnya jelas. Susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026, lalu ajukan pencairan. "Masih ada desa yang belum mengajukan pencairan DD karena desa tersebut belum bisa mengajukan. Hal ini terkendala karena desa belum melakukan rekonsiliasi," terangnya.

tahun ini juga berubah. Tidak semua desa dapat porsi sama. Desa mandiri mendapat 60 persen di tahap I dan 40 persen di tahap II. Desa non mandiri sebaliknya. "Tahun 2026 ini penyaluran DD ada dua tahap. Kalau desa mandiri akan mendapatkan penyaluran DD tahap I 60 persen dan tahap II 40 persen. Sedangkan desa non mandiri sebaliknya," tutupnya. Di sisi lain, anggaran juga menyusut tajam. Tahun lalu Rp 106 miliar. Tahun ini tinggal Rp 38,3 miliar. Turun jauh. Artinya, ruang gerak makin sempit. Kalau masih terlambat mengajukan, desa bukan cuma kehilangan waktu. Dana pun bisa lenyap.(jee)

PPPK Bengkulu Tengah Terseret Kasus Penimbunan Minyakita, Terancam Dipecat

BENTENG - Kasus penimbunan Minyakita di Bengkulu Tengah mulai merembet ke dalam. Bukan orang luar. Aparatur sendiri ikut terseret. RI (35), warga Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, yang diumumkan pada Jumat, 1 Mei 2026, ternyata berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia bertugas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Sungai Lemau. "Iya memang benar RI merupakan PPPK Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertugas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Sungai Lemau," kata Kepala Badan



RAHMAT

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kabupaten Bengkulu Tengah, Rahmat Apriadi, S.STP, ME melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Yudion, SH B K P S D M menyebutkan akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sanksi berat terbuka. Bahkan pemutusan kontrak kerja. "Hingga Selasa siang, kami belum menerima laporan dari OPD tempat tugas. Jika memang benar ada PPPK yang tersandung hukum, kami akan pelajari dulu dan berkoordinasi ke BKN," jelas Yudion. Kasus ini sendiri bermula dari operasi Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Tiga orang diamankan. Jumat malam itu, 1 Mei 2026, sekitar pukul 21.30 WIB. Lokasinya di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat. Di sana, satu unit truk sedang bongkar muatan. Bukan barang biasa. Minyak goreng subsidi. "Kita mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada dugaan penimbunan minyakita. Setelah mengetahui informasi tersebut tim langsung turun dan menemukannya," kata Kasat Reskrim AKP. Susilo. Tiga pelaku punya peran masing-masing. HR (37) sopir. RW (26) kernet. RI jadi penghubung, mencari kendaraan ekspedisi. Barang bukti tak sedikit. Polisi mengamankan 1.500 dus Minyakita bersama satu unit truk. Kini ketiganya sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Barang bukti yang kita amankan minyakitq 1.500 dus dan mobil truk," Pungkasnya. Kasus ini belum berhenti di penangkapan. Justu mulai terbuka. Petika, dampaknya bukan hanya hukum. Tapi juga kepercayaan publik.(jee)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management II/Sumatera 2 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, terhadap jaminan hutang debitur atas nama: MOHAMMAD YASIN a. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sesuai SHM No. 150 tanggal 30 November 2012 atas nama Loeoes Prasetyaning Boediasih, luas tanah 4.995 m², terletak di Desa Aluran Mumpo, Kec. Pematang Tiga, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu (sesuai sertifikat), setempat juga dikenal dengan Desa Aluran Mumpo, Kec. Pematang Tiga, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu. Nilai Limit Rp. 39.000.000,00 Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 8.000.000,00 b. Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sesuai SHM No. 144 tanggal 30 November 2012 atas nama Prayudhi Wiratama, luas tanah 17.981 m², terletak di Desa Aluran Mumpo, Kec. Pematang Tiga, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu (sesuai sertifikat), setempat juga dikenal dengan Desa Aluran Mumpo, Kec. Pematang Tiga, Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu. Nilai Limit Rp. 106.500.000,00 Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 22.000.000,00 PELAKSANAAN LELANG : Cara penawaran : Terbuka (Open Bidding) dengan mengakses url www.lelang.go.id Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran Batas Penawaran : Rabu, 20 Mei 2026 Pukul 14.30 WIB (sesuai waktu server) Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli : 2% dari Harga Lelang Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu, Jl. Museum No. 2, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singsaran Pati, Kota Bengkulu SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG : 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id 2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas. 3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini di umumkan. 4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is). 5. Peserta lelang wajib menyetujui jaminan ke nomor VA (virtual account) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. 6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicitil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Bengkulu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 7. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama Peserta Lelang. 8. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab Peserta Lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan. 9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/ dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang. 10. Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 11. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Bengkulu/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management II/Sumatera 2. 12. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke Kas Negara. 13. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada KPKNL Bengkulu di Telpun 0736-23085/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management II/Sumatera 2 Jl. Kapt. A. Rivali No.1008 Lt. 4 Gedung Menara Mandiri Palembang Telp. 0711 5229300 ext. 751 428. Palembang, 06 Mei 2026 PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. Regional Special Asset Management II/Sumatera 2 Reza Rachmadiananto Vice President

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Bengkulu akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu, terhadap hutang debitur : 1. DONI SASTRA 1 (satu) Unit Rumah Beserta Tanah seluas 390 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00133 tanggal 12 Mei 2015, atas nama Doni Sastra berikut dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Harga Limit Lelang Rp. 121.200.000,- dan Uang Jaminan Lelang Rp. 24.240.000,- 2. EFTA KURNIAWAN 1 (satu) Unit Rumah Beserta Tanah seluas 286 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00631 tanggal 13 Februari 2012, atas nama Efta Kurniawan berikut dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Harga Limit Lelang Rp.120.900.000,- dan Uang Jaminan Lelang Rp. 24.180.000,- 3. NAZIRWAN 1 (satu) Unit Rumah Beserta Tanah seluas 324 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02014 tanggal 21 November 2008 an. Nazirwan berikut dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Harga Limit Lelang Rp. 159.800.000,- dan Uang Jaminan Lelang Rp. 31.960.000,- 4. SURADI Sebidang Tanah seluas 18.210 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00418 tanggal 21 Mei 2021 an. Tasia berikut dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Harga Limit Lelang Rp. 163.890.000,- dan Uang Jaminan Lelang Rp. 32.778.000,- Pelaksanaan Lelang : Hari dan tanggal lelang : Rabu, 20 Mei 2026 Cara Penawaran : Open bidding dengan mengakses internet beralamat url : www.lelang.go.id Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. Batas Akhir Penawaran. Batas akhir penawaran : 20 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB (sesuai waktu server) Alamat Domain, tempat, dan penetapan pemenang lelang : Bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu, Jl. Museum No.2, Jembatan Kecil, Kecamatan Singsaran Pati, Kota Bengkulu. (Setelah batas akhir penawaran) Pelunasan harga Lelang : Telah efektif diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga terbentuk lelang SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG : 1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang yaitu dengan menggunakan aplikasi lelang internet (e-auction) dengan cara penawaran Open bidding pada alamat website lelang www.lelang.go.id 2. Peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terverifikasi pada alamat website www.lelang.go.id 3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas. 4. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan penjualannya sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan peminat/peserta lelang tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 5. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang. 6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan. 7. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. 8. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan penjualannya sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan peminat/peserta lelang tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 9. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Bengkulu, dan PT. Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Bengkulu, dan termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang. 10. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang berlaku 5 Januari 2024 berlaku ketentuan NJOP yang menjadi dasar pengenaan BPHTB Lelang yang digunakan adalah yang tertinggi diantara transaksi dan NJOP tahun terjadinya vide Pasal 46 Ayat (3) UU HKPD. 11. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat kantor di Jl Jati No. 16, Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Telp. (0736) 346828, atau KPKNL Bengkulu Telp: (0736) 23085. Bengkulu, 06 Mei 2026 PT. Bank Sinarmas, Tbk

Panggung Utama dan Stand UMKM Sudah Didirikan Pemkab Seluma Yakin MTQ Provinsi ke-37 Sukses

SELUMA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma yakin Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu di Kabupaten Seluma sukses.

Saat ini, persiapan MTQ ke-37 sudah berda di angka 95 persen. Bahkan, panggung utama dan stand UMKM sudah mulai didirikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Deddy Ramdhani, SE., M.SE., MA, mengatakan progres ini menunjukkan komitmen kuat panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan MTQ

ke-37.

"Alhamdulillah, persiapan kita sudah mencapai 95 persen. Venue utama dan stand UMKM sudah berdiri tegak. Tinggal finalisasi dan pengecekan akhir agar saat pelaksanaan nanti semuanya benar-benar siap," ujar Deddy, Selasa 5 Mei 2026.

Ini juga menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk pengamanan, kebersihan, hingga kelistrikan, agar

seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-37 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan sukses.

"Kami optimistis pelaksanaan MTQ tahun ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong geliat ekonomi melalui kehadiran UMKM," tuturnya.

Sementara itu, untuk pekerjaan fisik, seperti pembangunan jalan masuk, gapura serta penataan halaman Masjid Baitul Falihin sudah hampir rampung juga.

"Progres pekerjaan fisik juga sudah di angka 95 persen," ucapnya.

Sekda memastikan, sebelum hari H pelaksanaan, semua persiapan sudah 100 persen dan dipastikan tidak ada kendala yang berarti saat pelaksanaan. "Insya Allah semua sudah siap sebelum hari H pelaksanaan," tutupnya. (eng)



MTQ: Terlihat panggung utama MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu di Seluma sudah berdiri kokoh.

Bupati Pastikan Laporan Istri Siri Oknum PNS Disnakertrans Ditindaklanjuti

SELUMA – Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE., MM memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan pernikahan siri yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Seluma.

Laporan tersebut, disampaikan Istri siri oknum PNS di Disnakertrans Seluma bersama Kuasa Hukumnya, ke Bupati Seluma pada 28 April 2026 lalu.

Bupati Teddy mengatakan, akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk kepada dirinya.

Bahkan, laporan itu akan diproses sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Terkait laporan yang masuk, silakan disampaikan. Nanti akan ada tim yang membahas dan memprosesnya. Kita tunggu prosesnya," kata Bupati, Selasa 5 Mei 2026.

Diakui Teddy, ia belum secara langsung menelaah laporan dugaan nikah siri tersebut. Namun demikian, dirinya memastikan laporan tersebut tetap akan diproses.

"Saya belum melihat laporannya, tetapi pasti akan berproses," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, diduga menelantarkan anak kandung yang diperoleh dari Istri siri, oknum ASN Seluma dilaporkan istri siri ke Bupati Seluma dan Inspektorat Daerah Seluma, Senin 27 April 2026.

Oknum ASN yang dilaporkan berinisial HI yang bertugas di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Seluma.

"Kami mendampingi klien memasuki pengadilan ke Bupati dan Inspektorat atas dugaan penelantaran anak yang dilakukan oknum ASN di Disnakertrans kabupaten Seluma," kata Kuasa



Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE., MM.

Hukum, Muhammad Akbar, SH., MH.

Akbar, berharap Bupati Seluma dapat menanggapi terkait permasalahan yang dialami kliennya. Ia juga meminta Bupati agar oknum ASN tersebut dapat dipecah dengan tidak hormat karena sudah memalukan Kabupaten.

Mengingat, di dalam aturan ASN dilarang keras melakukan Nikah Sri karena melanggar UU Perkawinan No. UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PP No. 94 Tahun 2021.

"Kami berharap bapak bupati dalam menanggapi permasalahan ini serta serta memecat oknum ASN tersebut," tegasnya.

Akbar menceritakan, HI melakukan pernikahan siri dengan kliennya MM pada 24 Juni 2024 lalu. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki satu

orang putri berusia delapan bulan.

Kemudian, di Oktober 2025 lalu hubungan MM dan HI mulai merenggang karena HI ketahuan dengan istri sahnya sudah menikah siri dengan MM.

Sejak saat itu, kata Akbar, HI hanya sekali menafkahi

anaknya sebesar Rp200 ribuan.

Setelah itu, HI tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anaknya. Atas dasar itu, mereka melaporkan HI atas dugaan penelantaran anak.

Yang mana tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas No 23 Tahun 2002 dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak menjamin hak anak sebelum berumur 18 tahun, menjamin tumbuh kembang anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi.

"Sudah jelas di dalam UU perlindungan anak, sebelum anak berusia 18 Tahun masih tanggungjawab orang tua. Sebelum kami mengambil langkah hukum ini, kami sudah melakukan mediasi terhadap terlapor ini, namun kami tidak di tanggapi," tutupnya. (eng)

Usaha Karaoke di Simpang Enam Tais Tak Jadi Dibongkar

Satpol PP Minta Pemilik Urus Izin Usaha

SELUMA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Seluma tidak jadi membongkar tempat usaha karaoke yang berada di Simpang Enam Kota Tais, Selasa 5 Mei 2026. Data terdapat RB, room karaoke tersebut milik Lasmini (36).

Karaoke tersebut baru beroperasi sejak Januari 2026 lalu, di ruko yang Lasmini sewa, tepat di pintu gerbang menuju Kantor Bupati Seluma.

Gagalnya pembongkaran usaha karaoke oleh Satpol PP Seluma, karena saat dideklarasikan Satpol PP, tidak aktifitas yang bersifat ilegal di sana.

Karena, pemilik karaoke hanya menyediakan room dan tidak menyediakan minuman keras dan wanita pendamping atau Lady Companion (LC).

"Saya di sini hanya berusaha mencari makan, saya hanya buka karaokean dan menjual nasigoreng dan kopi saja. Tidak ada saya menyediakan minuman keras apa lagi menyediakan wanita pendamping," ujar Lasmini.

Lasmini melanjutkan, beberapa waktu lalu ia sempat berniat ingin mengurus izin usahanya. Namun, saat itu ia tidak mendapat restu dari Lurah setempat.

"Saya sudah mau urus izin, karena ini hanya karaoke family bukan tempat hiburan malam. Namun saat itu belum dapat izin dari Lurah," singkatnya.

Menanggapi hal itu, Lurah Talang Saling, Firman, beralih, pihaknya belum memberikan rekomendasi izin usaha kepada pemilik karaoke.

Karena, saat pemilik karaoke ingin mengurus izin, karaoke tersebut sudah mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke-2 dari Satpol PP Seluma.

"Kami tidak melarang warga untuk berusaha. Namun, jika kegiatan yang dilakukan menimbulkan keresahan dan sudah mendapat peringatan resmi,



DATANG! Tim gabungan, Satpol PP, Polri dan TNI saat mendatangi karaoke yang berada di Simpang Enam Tais, tepat berada di gerbang masuk kompleks Perkantoran Pemkab Seluma, Selasa 5 Mei 2026.

kami tidak berani mengeluarkan rekomendasi. Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan untuk memastikan prosedur dan persyaratan pendirian usaha karaoke," ucap Firman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Seluma, Parlyn Sianturi, SE., MH menegaskan, langkah pembongkaran sejatinya menjadi upaya terakhir setelah pemilik usaha dinilai tidak mengindahkan peringatan sebelumnya.

Bahkan, dalam pelaksanaan penertiban itu, pihaknya telah menurunkan personel yang dibackup oleh TNI dan Polri.

"Banyak warga yang mengadu karena aktivitas di lokasi tersebut meresahkan. Suara musik keras hingga dini hari mengganggu waktu istirahat warga. Selain itu, ada juga laporan terkait penjualan minuman keras dan dugaan praktik prostitusi," ujar Sianturi.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, petugas menjemput langsung pemilik usaha guna mem-

buka ruko yang berada di samping pintu gerbang kompleks perkantoran Bupati Seluma.

Setelah rolling door dibuka, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh ke setiap ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat karaoke.

Namun, dari hasil

pengecekan, petugas tidak lagi menemukan fasilitas utama karaoke seperti mixer, sound system, maupun televisi di dalam ruangan. Kondisi tersebut membuat rencana pembongkaran urung dilakukan.

Meski demikian, Satpol PP tetap mengambil langkah tegas dengan meminta pemilik usaha membuat surat pernyataan di atas materai.

"Dalam surat pernyataan yang telah dibuat, pemilik karaoke berkomitmen tidak akan kembali membuka atau mengoperasikan room karaoke sebelum mengantongi izin resmi dari instansi berwenang," kata Sianturi.

Untuk diketahui, penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Seluma, merupakan rangkaian untuk menjaga keamanan dan ketertiban menyambut MTQ ke-37 tingkat Provinsi di Kabupaten Seluma yang akan dilaksanakan Bulan ini. (eng)

Sapi Kurban dari Presiden untuk Seluma Seberat 977 Kg

SELUMA – Sapi kurban Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto akan dikurbankan di Masjid Al-Ikhlash, di Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) Seluma.

Sapi kurban presedin di Kabupaten Seluma, merupakan sapi dengan jenis Simmental, yang memiliki berat lebih kurang 977 Kilogram (Kg) yang merupakan sapi dari peternak lokal.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Seluma, Arian Sosial, SP., M.Si mengatakan, penetapan Masjid penerima bantuan kurban tersebut mengacu pada surat resmi dari Biro Administrasi Sekretariat Presiden tanggal 16 April 2026 dan diperkuat dengan surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu.

"Berdasarkan surat tersebut, telah ditetapkan calon-calon masjid penerima bantuan kurban dari Presiden RI di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Seluma," kata Arian, Selasa 5 Mei 2026.

Selain penetapan lokasi, Dinas Pertanian juga melakukan tahapan seleksi terhadap sapi yang akan diusulkan sebagai hewan kurban Presiden di Kabupaten Seluma.

Seleksi dilakukan melalui skema Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang diajarkan oleh masyarakat setempat.

Sebanyak tiga ekor sapi dari CPCL telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas dari Balai Veteriner Lampung.

Pemeriksaan meliputi kondisi fisik dan usia, serta memastikan sapi tersebut bebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat.

Dari hasil seleksi sementara, satu ekor sapi jenis Simmental milik peternak lokal bernama, Asep warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan menjadi kandidat terkuat.

Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 977 kilogram, tertinggi dibandingkan dua sapi lainnya yang turut diuji. (eng)



KURBAN: Sapi Kurban Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Seluma.

Mutasi Guru Bengkulu Selatan Tertahan Sistem

Fariq : Kita Tunggu Lampu Hijau dari Pusat

KOTA MANNA - Ribuan guru dan kepala sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan tampaknya harus sedikit lebih bersabar. Rencana mutasi besar-besaran yang digadagadag bakal meratakan tenaga pendidik di seluruh sekolah itu ternyata masih tertahan di meja administrasi. Bukan di daerah, tapi di sistem milik pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Bengkulu Selatan, Fariq Hafizh, S.IP MM membenarkan hal tersebut. Fariq menjelaskan bahwa seluruh proses mutasi saat ini masih dalam tahap verifikasi berjenjang dan belum bisa dieksekusi.

Menurutnya, alur mutasi tahun ini tidak bisa disamakan antara guru dan kepala sekolah. Untuk guru, prosesnya terbilang lebih singkat. Setelah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, data guru langsung diinput ke aplikasi I-MUT, sistem mutasi terintegrasi milik BKN. "Tapi untuk kepala sekolah, ceritanya beda," kata Fariq. Harus lewat aplikasi KSPS.

Saat ini BKPSDM masih menunggu input dari Dinas Pendidikan melalui aplikasi KSPS itu. Selama datanya belum masuk, belum bisa naik ke tahap I-MUT.

Artinya, bola saat ini ada di tangan Dinas Pendidikan. Mereka yang memegang kunci untuk memasukkan data kepala sekolah ke KSPS sebelum akhirnya bisa diproses lebih lanjut.

Setelah seluruh data, baik guru maupun kepala sekolah, berhasil masuk ke I-MUT, perjalanan belum selesai. Fariq menyebut, tahap krusial berikutnya adalah verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

"Proses di BKN itu butuh waktu sekitar lima hari kerja. Mereka akan cek kelengkapan, kesesuaian formasi, sampai syarat-syarat administratif lainnya," jelasnya.

Jika BKN sudah memberi persetujuan, barulah Pemkab Bengkulu Selatan bisa melangkah ke tahap final menerbitkan Surat Keputusan mutasi yang ditandatangani langsung oleh Bupati.

"Tanpa ACC BKN, kita nggak bisa terbitkan SK. Itu aturannya," tegas Fariq.

Fariq menegaskan, mutasi kali ini bukan sekadar rotasi rutin. Ada misi besar di baliknya,



FARIQ HAFIZH

yakni menjaga kualitas proses belajar mengajar di seluruh wilayah Bengkulu Selatan. Usulan mutasi ini murni

datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya pemerataan. Selama ini, ada sekolah yang kelebihan guru mata pelajaran tertentu, sementara di sekolah lain justru kekurangan hingga jam mengajar banyak yang kosong.

"Jangan sampai ada anak-anak kita yang kehilangan jam belajar hanya karena gurunya numpuk di satu sekolah," ujar Fariq.

Mutasi ini diharapkan bisa memastikan distribusi guru lebih merata, sehingga KBM tetap berjalan optimal di semua sekolah, dari kota sampai pelosok.(tek)

Bengkulu Selatan Masih Kekurangan Pabrik Sawit

Hanya 2 PKS, Kebun Rakyat Belum Tertampung Maksimal

KOTA MANNA - Industri kelapa sawit di Bengkulu Selatan terus bergeliat. Namun, kapasitas pengolahan yang ada saat ini dinilai belum sebanding dengan luasnya kebun sawit milik rakyat.

Saat ini hanya ada dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Bengkulu Selatan, yaitu PT SBS dan PT BSL. Dari keduanya, PT SBS menjadi sorotan karena beroperasi tanpa memiliki kebun inti sendiri. Artinya, seluruh bahan baku Tandam Buah Segar (TBS) yang diolah murni mengandalkan pasokan dari petani.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Arif Budiman, S.Hut M.Ling membeberkan data yang cukup mencengangkan. Berdasarkan statistik Perkebunan Bengkulu Selatan, total luas lahan perkebunan sawit rakyat sudah menyentuh angka 31 ribu hektare.

"Luas ini bukan lahan tidur. Mayoritas dari 31 ribu hektare itu sudah masuk kategori Tanaman Menghasilkan (TM). Artinya buahnya sudah rutin dipanen petani setiap dua minggu," jelas Arif saat ditemui RB Senin, 5 Mei 2026.

Arif menyebut, dua PKS yang ada saat ini rata-rata hanya mampu mengolah TBS sebanyak 30 ton per jam. Jika dihitung kasar, dengan jam operasional normal 20 jam per hari, satu pabrik hanya mampu menyerap 600 ton TBS per hari. Dua pabrik berarti 1.200 ton per hari.

Sementara potensi TBS dari 31 ribu hektare kebun rakyat bisa jauh di atas itu saat musim puncak. Akibatnya, antrean truk TBS di pabrik masih sering terjadi, terutama saat panen raya.

"Kita sangat membutuhkan tambahan pabrik. Bukan hanya untuk daya tampung, tapi juga untuk menciptakan persaingan harga yang sehat," tegas Arif.

Keberadaan PT SBS yang tidak punya kebun inti dinilai punya dua sisi. Sisi positifnya, pabrik ini jadi penampung murni bagi TBS petani. Petani tidak perlu khawatir buahnya ditolak karena pabrik lebih memprioritaskan kebun sendiri.

Namun sisi lainnya, PKS tanpa kebun inti sangat bergantung pada pasokan petani. Jika harga TBS di luar sedang tinggi, petani bisa saja menjual ke pabrik di kabupaten tetangga. Akibatnya pabrik kekurangan bahan baku dan tidak beroperasi optimal.

"Persaingan harga TBS ini yang kita harapkan. Kalau pabrik hanya dua, posisi tawar petani lemah. Kalau pabrik bertambah, petani bisa pilih harga terbaik. Ujungnya kesejahteraan petani naik," tambah Arif.

Dengan luas kebun rakyat 31 ribu hektare dan baru ditopang dua PKS, Bengkulu Selatan sebenarnya jadi lahan subur bagi investor pabrik sawit baru. Dinas Pertanian menyebut pihaknya terbuka untuk investor yang serius membangun PKS di wilayah ini.

Selain menyerap TBS, kehadiran pabrik baru juga diharapkan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari sektor transportasi, bengkel, hingga warung makan di sekitar pabrik.

Pemerintah daerah kini tengah memetakan lokasi strategis yang dekat dengan sentra kebun rakyat namun minim konflik lahan. Tujuannya agar investor bisa masuk tanpa terkendala masalah sosial.

Sampai saat ini, harga TBS di tingkat petani Bengkulu Selatan masih fluktuatif mengikuti harga CPO global dan kebijakan pabrik. Dengan tambahan pabrik, diharapkan harga lebih stabil dan petani tidak lagi jadi pihak yang selalu "terima harga".(tek)



DATANG : Tim penilai Desa Anti Korupsi saat mendatangi Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino Selasa, 5 Mei 2026.

Pemkab Bengkulu Selatan Genjot Penilaian Perluasan Desa Anti Korupsi

KOTA MANNA - Komitmen memberantas korupsi hingga ke akar rumput kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Senin, 5 Mei 2026, Pemkab secara resmi menggelar penilaian perluasan Desa Anti Korupsi dengan menasar tiga desa yang dinilai paling siap mewakili daerah di kancah provinsi.

Tiga desa yang masuk radar penilaian kali ini adalah Desa Tanjung Eran, Desa Tango Raso, dan Desa Lubuk Sirih Ilir. Ketiganya bukan desa sembarangan. Dalam dua tahun terakhir, mereka konsisten menunjukkan gebrakan tata kelola pemerintahan:

mulai dari digitalisasi layanan surat-menyurat, publikasi APBDes secara terbuka di balai desa, hingga pelibatan aktif warga dalam Musyawarah Desa.

Tim penilai turun langsung ke lapangan dengan membawa 18 indikator utama. Penilaiannya tidak main-main. Beberapa aspek yang disorot antara lain transparansi anggaran, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa, efektivitas pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga budaya anti gratifikasi di tingkat perangkat desa.

"Desa anti korupsi bukan sekadar bebas dari kasus. Yang kami cari adalah

sistem yang membuat korupsi sulit terjadi," tegas Inspektur Inspektoral Daerah Bengkulu Selatan Hamdan Syarbaini S.Sos CeRa.

Contohnya, apakah semua pembayaran proyek desa sudah non-tunai? Apakah warga bisa akses RAB proyek lewat papan informasi atau website desa?

Agar penilaian berjalan objektif, Pemkab menerjunkan tim gabungan dari tiga Organisasi Perangkat Daerah. Inspektoral Daerah sebagai pengawal akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memahami desa, serta Dinas Kominfo

yang menilai aspek keterbukaan informasi publik dan digitalisasi layanan.

Hasil penilaian ini akan menentukan satu desa terbaik yang diusulkan mewakili Bengkulu Selatan pada penilaian Desa Anti Korupsi tingkat Provinsi Bengkulu 2026. Jika lolos provinsi, desa tersebut berpeluang maju ke penilaian tingkat nasional oleh KPK.

Bupati Bengkulu Selatan menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari agenda besar membangun pemerintahan berintegritas dari desa.

"Korupsi paling dekat dengan rakyat itu ada di desa. Kalau desanya bersih, pelayanan lancar,

pembangunan tepat sasaran, maka kepercayaan publik ke pemerintah akan naik," tulisnya dalam keterangan resmi.

Dengan adanya penilaian ini, Pemkab berharap muncul efek domino. Desa yang belum terpilih pun terpacu berbenah. Target jangka panjangnya: seluruh desa di Bengkulu Selatan memenuhi standar Desa Anti Korupsi pada 2028.

Tim penilai akan merampungkan rekapitulasi nilai dalam sepekan ke depan. Pengumuman desa terbaik rencananya digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026.(tek)

Lulus 100 Persen, SMAN 2 BS Pilih Perpisahan Sederhana

KOTA MANNA - Sebanyak 299 siswa kelas XII SMAN 2 Bengkulu Selatan dinyatakan lulus 100 persen pada pengumuman kelulusan yang dilakukan secara daring, 4 Mei 2026

Sehari setelahnya, Selasa, 5 Mei 2026, para siswa menggelar acara perpisahan sederhana di lingkungan sekolah sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada para guru. Kegiatan tersebut berlangsung tanpa perayaan meriah.

Tidak ada penampilan tari, musik, maupun hiburan lainnya. Acara difokuskan pada momen kebersamaan, seperti pengalungan samir oleh kepala sekolah dan sesi foto bersama.

Wakil Kepala Kesiswaan, Dadi Gustian M.Pd, menjelaskan bahwa ke-



BERSAMA : Kepala SMAN 2 BS Nodi Asponi didampingi wakil kepala dan dewan guru foto bersama siswa kelas XII usai kegiatan perpisahan.

giatan tersebut merupakan inisiatif siswa kelas XII. Pihak sekolah hanya hadir sebagai undangan, sementara persiapan dilakukan oleh OSIS.

"Ini murni keinginan siswa kelas XII. Mereka ingin mengadakan perpisahan secara sederhana tanpa euforia berlebihan. Sekolah hanya diundang,

sedangkan persiapan teknis seperti kursi dan dekorasi ringan dilakukan oleh OSIS," ujar Dadi.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Bengkulu Selatan, Nodi Asponi, M.Pd dalam sambutannya memberikan motivasi kepada para siswa agar terus melanjutkan pendidikan dan menjaga nama baik

almamater.

"Kami berharap anak-anak tidak berhenti sampai di sini. Teruslah berjuang meraih cita-cita, jaga integritas, dan bawa nama baik sekolah ke jenjang yang lebih tinggi," pesannya.

Salah satu perwakilan siswa, Rani, menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru atas bimb-

ingan selama ini. Mereka sadar selama tiga tahun menimba ilmu, banyak terdapat kesalahan, kekeliruan selama proses belajar. Dengan bakal yang telah mereka dapatkan, mereka optimis bisa melangkah kedepan mengejar cita-cita yang telah diimpikan.

"Kami sangat berterima kasih atas kesabaran dan dedikasi bapak ibu guru dalam mendidik kami. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga untuk masa depan kami," ungkapnya.

Tahun ini, SMAN 2 Bengkulu Selatan juga mencatat prestasi membanggakan. Melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), empat siswa berhasil menembus program studi kedokteran, serta 27 siswa lainnya lulus ke berbagai perguruan tinggi negeri.(tek)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PENGUMUMAN
(Tentang Sertifikat Hilang)
Nomor : 3/DI304-07.03/IV/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	Nama / Alamat	Jenis dan Nomor Hak	Hak Atas Tanah	Luas	Waktu	Terdaftar / Pendaftaran	Masuk	Alamat Tanah	Keterangan
1	MUSAWAR (Desa Pango Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)	Perumahan	Perumahan	1000 m ²	19-09-2011	19-09-2011	1	Desa Manna Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	Beralasan

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nama Pemohon : YANSIS

Manna, 05-05-2026
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
AZMAN HADI, S.ST., M.H.
NIP. 19740929 199603 1 001

Teken MoU dengan UMB, Pemkab Kaur Ajak ASN Tempuh Program Pascasarjana

BINTUHAN - Untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur kembali mengambil langkah jitu menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), salah satu universitas swasta terkemuka di Provinsi Bengkulu.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Pemkab Kaur, dan juga pihak UMB Selasa, 5 Mei 2026 di Aula Lantai II Setda Kaur.

Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I mewakili Bupati Gusril Pausi S.Sos., M.A.P melakukan penandatanganan MoU tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan terima kasih kepada pihak UMB karena telah menjalin kerja sama program Pascasarjana dengan Pemkab Kaur.

Tentu saja program ini sangat menguntungkan bagi Pemkab Kaur, musabab akan meningkatkan kualitas SDM di ruang lingkup Pemkab Kaur yang akan berimbas pada pesatnya kemajuan pembangunan dan pendidikan di Kabupaten Kaur.

"Hari ini kita teken MoU dengan UMB soal Pascasarjana, alhamdulillah. Ini adalah salah satu upaya kita Pemkab Kaur untuk meningkatkan kualitas SDM kita," ucap Wabup.

Lantaran program ini sudah berjalan, Wabup mengajak ASN Pemkab Kaur khususnya pada bidang pendidikan dan manajemen untuk ikut serta program Pascasarjana di UMB. Karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan, UMB telah menyiapkan berbagai promo menarik berupa diskon untuk ASN Pemkab Kaur yang hendak menempuh program Pascasarjana di pendidikan dan juga manajemen.

"Kepada ASN kita khususnya guru dan manajemen, silahkan ikut program Pascasarjana yang telah kita jalin dengan UMB, ada promo dan diskon yang telah mereka siapkan," ajak Wabup.

Ia berharap melalui program ini, peningkatan kualitas SDM di Pemkab Kaur lebih pesat.

Apalagi Pemkab Kaur sendiri telah banyak menjalin kerjasama dengan universitas-universitas lainnya, mulai dari UGM, UI, dan universitas terkemuka lainnya.

Sehingga ada peluang lebih besar bagi ASN di ruang lingkup Pemkab Kaur untuk menempuh pendidikan Pascasarjana.

"Mudah-mudahan dengan ini, kualitas SDM kita bisa lebih meningkat. Imbasnya untuk kemajuan Kaur ini sendiri," pungkash Wabup.

Sementara itu, Waka I Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMB Dr. Tomi Hidayat M.Pd., mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program-program menarik bagi para ASN Kaur untuk menempuh pendidikan Pascasarjana di UMB.

Diantaranya adalah diskon 50 persen selama dua semester bagi ASN Kaur yang hendak melanjutkan pendidikan, dengan nama beasiswa kader Muhammadiyah serta beragam fasilitas lainnya. "Untuk ASN Kaur kami sudah siapkan beragam program unggulan, diantaranya adalah beasiswa kader Muhammadiyah," pungkashnya. (cil)

Uji Ketahanan Fisik, Polres Kaur Laksanakan TKJ Berkala

BINTUHAN - Dalam upaya menjaga ketahanan fisik dan meningkatkan kesehatan personelnya, Polres Kaur menggelar Tes Kesamaptan Jasmani (TKJ) periode I tahun 2026 di lapangan Satya Haprabu Polres Kaur Selasa, 5 Mei 2026.

Kegiatan TKJ diikuti oleh Kapolres Kaur beserta personel Polres dan Polsek jajaran itu bertujuan untuk mengukur kekuatan stamina, dan kesamaptan seluruh anggota Polres Kaur. "Kita laksanakan TKJ secara berkala, untuk menguji ketahanan fisik dan juga kesiapan personel dalam menjalankan tugasnya nanti dilapangan," kata Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono, S.I.K., M.Tr.

Opsla disela-sela TKJ, Selasa 5 Mei 2026. Disampaikan, TKJ merupakan program kesatuan Polri untuk menilai sejauh mana kemampuan fisik para anggotanya.

Hal ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara berkala pada setiap semester atau 6 bulanan.

Diharapkan melalui TKJ, kemampuan fisik dan kesehatan anggota Polri dapat dievaluasi. Juga ini sekaligus menjaga kebugaran anggota Polri agar tetap prima dan selalu siap bertugas dalam kondisi apapun. "Kita minta para personel dapat menjaga kebugaran jasmani agar tetap prima, sehingga dalam melaksanakan tugas kepolisian sehari-hari sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat berjalan maksimal," harapnya.

Ditambahkannya, kegiatan kesamaptan dibagi menjadi dua gelombang, yakni pada Selasa, 5 Mei 2026 dan Jumat, 8 Mei 2026.

Dari total 368 personel Polres Kaur dan Polsek jajaran, sebanyak 113 personel telah mengikuti kegiatan pada gelombang pertama, sementara 255 personel lainnya dijadwalkan mengikuti pada gelombang berikutnya. (cil)



TANDATANGANI: Penandatanganan MoU UMB dan Pemkab Kaur untuk program peningkatan kualitas SDM melalui kuliah Pascasarjana.

Inspektorat Panggil Dua ASN Terlapor Dugaan Perselingkuhan

BINTUHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur mulai melakukan pemanggilan terhadap dua orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemkab Kaur yang dilaporkan soal kasus dugaan perselingkuhan, Selasa, 5 Mei 2026.

Pemanggilan tersebut bertajuk audit investigasi terlapor FI (31) yang dilaporkan oleh sang suaminya EF (35) warga Kabupaten Seluma pada tanggal 20 April yang lalu.

FI sendiri dilaporkan, karena diduga berselingkuh dengan rekan satu kantornya NU (36) yang juga berstatus sebagai ASN di ruang lingkup Pemkab Kaur.

Inspektur Inspektorat Kaur Harika, SE menyampaikan, pada penanganan kasus ini pihaknya telah membentuk tim investigasi.

Kemarin, tim mulai melakukan pemanggilan secara maraton terhadap dua orang terlapor. Untuk mengumpulkan bukti-bukti keterangan, dan menentukan nasib kedua ASN tersebut.

"Hari ini kita mulai lakukan pemanggilan, untuk mengumpulkan bukti-bukti keterangan dari terlapor dan juga pelapor terkait kasus perselingkuhan ini," ucap Harika.

Setelah melakukan pengumpulan barang dan bukti ini nanti, barulah hasilnya akan disampaikan langsung ke pimpinan Pemkab Kaur.

Untuk dilanjutkan dengan sidang Pembinaan Aparatur Pemerintah (Binap). Bilamana keduanya memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ASN, maka sanksi tegas siap



HARIKA

dilayangkan.

"Untuk hasilnya nanti, akan ada sidang Binap terhadap keduanya. Kalau memang salah dan terbukti secara hukum, maka akan ada tindakan tegas sesuai undang-undang," tegas Harika.

Sebagai informasi, EF mengaku, ia telah memasukkan laporan resmi bersama pendamping hukumnya soal dugaan perselingkuhan istrinya ke Inspektorat Kaur beberapa waktu yang lalu.

Dalam laporan tersebut, dirinya melampirkan beberapa barang bukti dugaan perselingkuhan istrinya tersebut.

Diantaranya adalah foto baju ASN pria yang telah dicuci dan disembunyikan sang istri di kontrakan miliknya di Kabupaten Kaur.

Foto kemesraan keduanya saat bersantai di pantai, hingga video penggerebekan berdurasi kurang lebih 1 menit keduanya di salah satu hotel Kota Bengkulu beberapa waktu.

"Saya telah melaporkan istri sah saya yang berstatus sebagai ASN dengan rekan kerja satu kantornya, atas dugaan perselingkuhan ke Inspektorat Kaur beberapa waktu yang lalu," kata EF.

Ia membeberkan, perselingkuhan antara istri dan rekan kerjanya tersebut pertama kali terendus lantaran dirinya menaruh curiga terhadap sikap istri yang kian lama kian berubah.

Sang istri berperilaku berbeda dibanding dengan biasanya, mulai dari sikap hingga dandanannya mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan.

Kecurigaan semakin bertambah setelah tetangga rumah kosan sang istri di Kabupaten Kaur memberikan laporan bahwa sang istri acap kali membawa lelaki lain masuk ke dalam kontraknya.

Berawal dari kecurigaan inilah EF, mulai melakukan penelusuran hingga puncaknya berhasil melakukan penggerebekan sang istri dan selingkuhannya di salah satu hotel di Kota Bengkulu.

"Bukti-bukti yang saya lampirkan lengkap, harapannya kedua oknum ASN ini bisa mendapatkan perlakuan yang setimpal. Karena ini adalah hal yang sangat fatal, keduanya sudah mempunyai anak dan keluarga masing-masing," sampai EF.(cil)

19 Paket Dinas PUPR Serentak Dilelang Juli Mendatang

BINTUHAN - Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kaur Sekretariat Daerah (Setda) Kaur hingga bulan Mei 2026, masih terus memproses lelang paket kegiatan.

Khususnya pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur.

Untuk saat ini sedang dalam tahapan jasa konsultasi, atau rangkaian tahapan seleksi untuk menunjuk penyedia jasa (konsultan) yang akan menyusun dokumen, memberikan saran strategis, dan mengelola tahapan tender/lelang agar proyek konstruksi atau pengadaan jasa lainnya mendapatkan vendor pelaksana terbaik.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala UKPBJ Setda Kaur Boyke Simanjuntak SE., MM., bahwasanya untuk saat ini tender proyek memang dalam tahap jasa konsultasi dan hampir 100 persen rampung.

Setelah rampung 100 persen nanti, selanjutnya adalah tahap masa kerja konsultan selama satu bulan.

Sehingga tender proyek akan dilaksanakan serentak pada bulan Juli yang akan datang setelah masa kerja jasa konsultasi selesai. "Untuk proses tender proyek, sekarang dalam tahap jasa konsultasi. Mungkin Juli, akan kita launching serentak untuk seluruh proyek di Pemkab Kaur," kata Boyke.

Disampaikan, di tahun 2026 ini total ada 19 paket pekerjaan di Pemkab Kaur yang akan masuk tahap tender.

Semuanya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaur, dengan pagu anggaran kurang lebih sebesar Rp20 miliar.

Paket kegiatannya pun beragam, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, beronjong, hingga rehab rumah dinas Bupati, Wabup dan juga Sekda. "Rata-rata paket tahun ini hanya ada di Dinas PUPR, dengan berbagai macam kegiatan kebanyakan adalah jalan dan jembatan," jelasnya.

Boyke berharap, kedepan pada proses pelaksanaan tahapan tender tidak ada hambatan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar.

Kegiatan yang telah masuk dalam tahapan perencanaan, bisa dilaksanakan sampai dengan



SEPI: Kantor UKPBJ Setda Kaur saat ini dalam tahapan tender paket proyek 2026.

pergantian tahun tidak ada yang terhambat.

Ia juga meminta kepada OPD terkait agar terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan UKPBJ, supaya segala bentuk pemberkasan bisa disiapkan secepatnya.

"Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya, targetnya seluruh kegiatan bisa berjalan dengan lancar tahun ini," tukasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaur bidang Bina Marga menggelontorkan dana sebanyak kurang lebih Rp20 miliar untuk perbaikan jalan dan juga jembatan.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PUPR Kaur Lindartawan, ST melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Lendrianto, ST, dikonfirmasi terkait dengan kegiatan ini mengaku bahwa untuk anggaran tidak ada perubahan sama seperti yang telah direncanakan sebelumnya yakni kurang lebih Rp20 miliar.

Akan tetapi, untuk pelaksanaan kegiatan memang belum berjalan saat ini masih dalam tahapan perencanaan di ULP.

"Untuk proyek jalan dan jembatan, sekarang lebih tepatnya masih dalam proses perencanaan di ULP," kata Lendri.

Disampaikan, melihat dari progres yang saat ini sedang berjalan kemungkinan besar pengerjaan kegiatan rata-rata akan dilakukan pada pertengahan tahun yang akan datang ataupun paling lambat dimulai bulan Agustus.

Namun, ia memastikan semua kegiatan tidak akan terhambat dan pasti dilaksanakan sebab semuanya sudah masuk DPA.

"Mungkin bulan 6 sudah ada yang jalan, target kita Agustus semuanya sudah pengerjaan sehingga bisa rampung sampai akhir tahun," ujar Lendri.

Kegiatan di tahun 2026 ini sendiri anggarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) murni, karena di tahun 2026 ini Dana Alokasi Khusus (DAK) memang kosong di Dinas PUPR Kaur.

Ada beberapa item kegiatan dengan pagu dana cukup besar yang akan dilaksanakan diantaranya adalah pembangunan peningkatan jalan Naga Rantai Muara Sahung dengan pagu kurang lebih Rp4,3 miliar.

Kemudian ada pembangunan jalan Muara Sahung Bukit Makmur dengan pagu dana sebesar Rp700 juta dan juga beberapa paket lainnya total paket pekerjaan di tahun 2026 ini sebanyak 24 item. "Item kegiatannya nanti total ada 24, semuanya adalah perbaikan jalan dan juga jembatan," jelas Lendri. (cil)



Sidang Korupsi DAK Pertanian: Ahli Ungkap Kerugian Negara Rp2,8 Miliar

4 Bangunan Total Loss

BENGKULU - Kas pembangunan unit pengolahan pakan di Kabupaten Kaur benar-benar ambyar. Bukannya jadi solusi bagi peternak, proyek ini malah bikin negara buntung sampai Rp2,8 miliar.

Angka fantastis itu dibongkar ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Taufik Hidayat Amd. Hal itu ia sampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Negeri Bengkulu, Selasa, 5 Mei 2026.

"Kerugian negara berdasarkan hasil audit mencapai kurang lebih Rp 2,8 miliar," tegas Taufik di hadapan majelis hakim.

Uang rakyat itu menguap lewat proyek fisik yang asal-asalan. Al-



BEBERKAN : Saksi ahli dari BPKP Bengkulu beberkan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Selasa 5 Mei 2026.

hasil, empat bangunan dinyatakan *total loss*. Alias gagal total. Salah satunya di Desa Bandu Agung. Kondisinya mengenaskan. Dind-

ingnya sudah pecah-pecah. Kabel listrik menjuntai belum siap. Padahal bangunan itu tegak di tengah kawasan kebun sawit.

Taufik bercerita, timnya butuh waktu tiga bulan untuk menguliti borok proyek ini. Enam orang dikerahkan. Mereka turun langsung ke lapangan, mengecek harga, hingga menghitung volume fisik yang tidak sesuai realisasi.

"Kami fokus pada bangunannya. Ketika ditemukan gagal konstruksi, maka dinyatakan *total loss*," katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Dr. Arief Wirawan SH, MH, tampak puas. Baginya, keterangan BPKP ini jadi peluru tajam untuk menjerat para terdakwa.

☞ Baca **SIDANG...**Hal 11



BERIKAN : Wajah Slamet Budi Sutrisno tampak semringah saat terima manfaat bedah rumah dari Kapolda Bengkulu Irjen Mardiyono, S.I.K., M.Si.

Buruh Batako Menangis, Rumahnya Dibedah Kapolda

BENGKULU - Wajah Slamet Budi Sutrisno tampak semringah. Buruh pembuat batako asal Desa Babatan, Kabupaten Seluma itu tak menyangka. Selasa, 5 Mei 2026, impiannya memiliki hunian layak akhirnya mulai terwujud.

Slamet hanya bisa berkaca-kaca. Matanya merah. Ia seolah tak percaya gubuk reotnya bakal disulap menjadi bangunan permanen oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si.

"Terima kasih banyak Pak Kapolda. Saya hanya buruh batako, penghasilan cuma pas-pasan," ujar Slamet liris saat prosesi peletakan batu pertama kemarin 5 Mei 2026 siang.

Selama ini, kondisi hunian Slamet memang memprihatinkan. Jauh dari kata sehat. Alhasil, lewat program bedah rumah ke-76 jajaran Polda Bengkulu ini, pengerjaan dimulai tepat pukul 13.00 WIB.

Kapolda datang tidak sendiri. Beliau didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) mulai dari Irwasda, Karoops, Karo SDM, Karo Logistik, Kabid Propam, perwakilan Dansat Brimob, hingga Kapolres Seluma.

☞ Baca **BURUH...**Hal 11



SELEKSI: 51 pelajar utusan kabupaten/kota mengikuti seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi tahun 2026.

Seleksi Paskibraka Provinsi Bengkulu 2026 Diikuti 51 Pelajar Terbaik

BENGKULU - Persaingan dimulai. Ketat. Sebanyak 51 pelajar terbaik dari kabupaten/kota se-Bengkulu mulai berebut posisi Paskibraka tingkat provinsi, Selasa, 5 Mei 2026. Seleksi digelar di Hotel Adeeva Kota Bengkulu.

Mereka datang dengan satu

tujuan. Lolos. Di ruang seleksi, wajah tegang terlihat. Ada yang diam, ada yang saling menyemangati pelan.

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, membuka langsung kegiatan itu. Penyematan tanda peserta jadi tanda dimulainya rangkaian

seleksi. Lima hari ke depan tidak mudah. Mulai 5 hingga 9 Mei 2026, peserta digembleng lewat berbagai tes.

Dari wawasan kebangsaan, intelegensi, kesehatan, psikotes, hingga baris-berbaris dan kesamaptaaan.

Puncaknya di akhir seleksi. Pantohir.

Dari 51 peserta, 21 di antaranya putri dan 30 putra. Semuanya hasil saringan ketat dari daerah masing-masing.

Nandar mengingatkan ini bukan sekadar lomba.

☞ Baca **SELEKSI...**Hal 11



BONGKAR: Pemkot Bengkulu melakukan pembongkaran awning di sebelah PTM Kota Bengkulu.

Lapak PTM Dibongkar, Pemkot Klaim Ikuti Status Lahan

BENGKULU - Lapak dibongkar. Pedagang terdiam. Tiang baja ringan di samping Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu mulai diturunkan, Selasa, 5 Mei 2026. Satu per satu dilepas.

Beberapa pedagang hanya melihat. Ada yang mengeleng pelan. Pemkot Bengkulu lewat kuasa hukumnya, Dr. Elfahmi Lubis, SH, menyebut langkah itu bukan tanpa alasan.

Mereka mengaku mengikuti status lahan yang dinyatakan milik keluarga Fransiskus Tjandra. "Pembongkaran ini adalah wujud kepatuhan Pemkot Bengkulu terhadap hukum. Lahan ini sah milik Pak Tjandra," ujarnya.

Dilakukan sukarela. Ia menegaskan tidak ada unsur paksaan dalam pembongkaran itu. Semua disebut sudah dipahami pihak terkait.

Padaحال sebelumnya sempat ada rencana lain. Pemkot sempat ingin membangun awning untuk pedagang yang belum kebagian kios di dalam pasar. Tapi rencana itu tidak dimaksudkan menguasai lahan.

"Ini murni solusi sementara bagi pedagang, bukan untuk mengambil alih lahan," katanya. Masalah belum selesai. Ahli waris pemilik lahan sudah melapor ke Polresta Bengkulu sehari sebelumnya, Senin, 4 Mei 2026. Laporan itu terkait dugaan penyerobotan tanah dan pengrusakan patok batas.

☞ Baca **LAPAK...**Hal 11

BINGUNG HARI MINGGU BEROBAT KEMANA ?
KINI HADIR LAYANAN DI RS TIARA SELLA

SUNDAY CLINIC
(LAYANAN POLIKLINIK DI HARI MINGGU)

KUNJUNGI SUNDAY CLINIC DI RS TIARA SELLA DAN NIKMATI KEMUDAHAN BEROBAT DI AKHIR PEKAN!

LAYANAN INFORMASI DAN PENDAFTARAN

08117153399
digital.rstiarasella.com
0736-20350

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN SEPENUH HATI

@rstiarasella | Rumah Sakit Tiara Sella | info@rstiarasella.com | 08117307272 | (0736)20350

ASTRA MOTOR member of ASTRA

Semangat Honda
Periode 01 - 31 Mei 2026
Spesial Mei Makin Untung Angsuran Terjangkau Honda

Pot. Angsuran Rp. 225 Ribu
Cukup Bayar Rp. 1,65 Jutaan
Hemat Angsuran Rp. 8,1 Jutaan

FREE COVER SMARTKEY UNTUK PEMBELIAN PCX 160 PERIODE MEI 2026

HONDA
One HEART.

TRULY EXCEPTIONAL

ASTRA MOTOR member of ASTRA

Cari Promo Honda? Chat Amanda Aja
0822.1008.8133

Info Service & Perbaikan
0819-2500-989
WhatsApp (Tany. Lsm) 0819-2500-989